

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN SEKOLAH (BOS) DI SDN 25 PALU TIMUR
KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Datokarama Palu*

Oleh:

**AININ MAWADDAH
NIM: 20.5.12.0211**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATAOKARAMA PALU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudia hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 06 Agustus 2025
Penyusun,



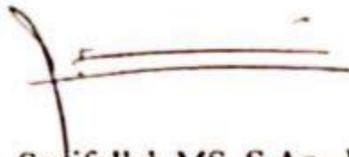
Ainin Mawadah
NIM: 21.5.12.01211

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur, Kota Palu” oleh mahasiswi atas nama Ainin Mawadah NIM. 20.5.12.0211, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah melalui pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

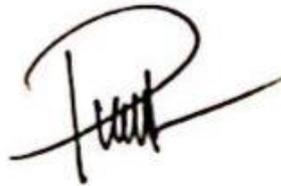
Palu, 31 Juli 2025 M
06 Safar 1447 H

Pembimbing I



Syaifulloh MS, S.Ag., M.Si.
NIP. 19740828 200501 1002

Pembimbing II

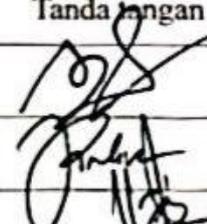


Rachmawati A. Rifai, M.M.
NIP.19881006 202321 2 044

PENGESAHAN SKRIPSI

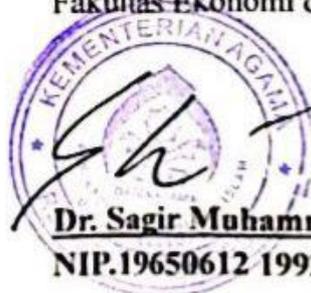
Skripsi saudara (i) **Ainin Mawaddah**, NIM. 20.5.12.0211 dengan judul “**Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur Kota Palu**” yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal **19 Agustus 2025 M** yang bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1447 H**, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi **Ekonomi Syariah** dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Abdul Jalil, S.E., M.M	
Munaqisy I	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	
Munaqisy II	Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak	
Pembimbing I	Syaifullah MS, S.Ag. M.S.I	
Pembimbing II	Rachmawati A, Rifai, M.M.	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP.19650612 199203 1 004

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Nur Svamsu, S.H., M.S.I
NIP.19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur, Kota Palu**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam penggunaan Dana BOS di SDN 25 Palu Timur. Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang ditemukan di lapangan, yakni pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan guna meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Penulis menyadari bahwa dalam proses kegiatan penulisan, mulai dari penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hi. Sadri B. Syuaib dan Hj. Dahnia selaku orang tua penulis yang telah banyak memberikan dukungan, support dan materi kepada penulis. Dan untuk adik-adik ku tersayang Rahmatutsani, Annisa Ramadhani, dan Hafidzah Fatiaturrahmi yang telah memberikan dukungan dan support kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik tahun ini.

2. Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta pihak pimpinan lainnya yang telah memberikan motivasi, semangat serta kebijakan kepada mahasiswa
3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Datokarama Palu, Dr. Syaakir Sofyan, S.I., M.E. Selaku Wakil Dekan Bidang akademik dan Kelembagaan. Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. dan Dr. Malkan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama. Yang telah mengembangkan fakultas ini secara baik, baik dari segi kurikulum serta sarana dan prasarannya.
4. Syaifullah MS, S.Ag., M.Si dan Rachmawati A Rifai, S.E., M.M selaku pembimbing I dan II yang telah sabar dan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan arahan, nasehat dan bantuannya dengan sangat baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Dr. Ermawati., M.Ag Selaku pembimbing akademik terima kasih yang tulus atas bimbingan yang telah di berikan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Datokrama Palu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di UIN Datokrama Palu.
7. Sekolah SDN 25 Palu timur, kepada Ibu Zulmin, S.Pd. SD., M.Pd. sebagai Kepala Sekolah dan bapak Rommy, S.Pd. Gr. Sebagai bendahara dan bapak

Safrudin R. Lamadang sebagai guru dan selaku narasumber penulis dalam penelitian ini yang mana telah bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.

8. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang telah memberikan izin bagi penulis, mulai dari KKP hingga penelitian berlangsung. Terimakasih juga kepada ibu Sitti Patimassang, S.E., M.M yang selalu memberikan support kepada penulis, khusus nya bagian keuangan yang telah banyak membantu penulis mengumpulkan data-data, baik itu arahan maupun jawaban yang penulis pertanyakan mengenai data penelitian. Dan terimakasih juga kepada Kak Fahrul Gunawan, S.Pd., M.Pd yang selalu penulis reportkan dan bersedia membantu penulis memberikan jawaban mengenai penelitian penulis.
9. Kepada Siti Rohani, Wanda Amelia, S.E. Aulia Rahmi, S.E. dan Iyam Pratiwi selaku teman yang sudah penulis reportkan dari proposal sampai terselesainya skripsi ini. Dan teman-teman lainnya.
10. Kepada Geng Base camp lasoso yang telah menemani penulis dari semester awal perkuliahan sampai dengan berakhirnya masa perkuliahan ini.
11. Untuk seseorang yang penulis temui di tahun 2022, yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terima kasih untuk patah hati yang di berikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan,

sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses untuk tetap mengejar pendidikan sehingga penulis berada di titik ini. Terima kasih telah menjadi bagian yang menyenangkan sekaligus patah hati yang paling menyakitkan dari pendewasaan ini. Dan penulis percaya setiap perbuatan pasti ada balasan karma nya, entah itu secara instan atau menunggu beberapa tahun kedepan. Dan pada akhirnya penulis paham “*Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang nya*”.

12. Dan untuk penulis sendiri Ainin Mawaddah, terima kasih telah berjuang dan bertahan sampai tahap ini, itu sangatlah tidak mudah. Banyak rintangan dan badai yang di hadapi oleh penulis, mulai dari badai pertemanan sampai percintaan, dan sampai sekarang ini penulis masih memilih untuk tetap bertahan hidup. Doa nya penulis untuk diri sendiri, tetap kuat yah untuk menghadapi dunia yang kadang tidak berpihak untuk diri sendiri. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah karena sebagai anak pertama perempuan memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi kaka yang baik sekaligus pelindung bagi adik-adik nya. Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini menjadi awal kesuksesan di masa depan. Sekali lagi terimakasih untuk diri sendiri yang tidak pernah menyerah. Proud of me

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi Teknik penulisan, penyusunan kalimat, maupun dari penyajian materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini sehingga dapat menulis skripsi ini

berguna bagi diri penulis dan para pembaca. Tidak lupa penulis memohon maaf segala kesalahan dan kekurangan selama proses dan penyelesaian skripsi ini, hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa jugalah kita berdoa semoga bantuan yang diberikan mendapat pahala, Amin.

Akhirnya, penulis berharap semoga amal baik dari pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini mendapatkan ridho dan balasan dari Allah swt. Semoga Allah menjadikan skripsi ini sebagai pendorong bagi dunia Pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Palu, 6 Agustus 2025



Penulis
Ainin Mawaddah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penegasan Istilah.....	9
F. Garis-Garis Besar Isi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Transparansi.....	17
C. Akuntabilitas.....	21
D. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	26
E. Kerangka Pikir	31
BABIII METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Kehadiran Peneliti.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pengecekan Keabsahan Data	41
BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Transparansi dalam Penggunaan Dan BOS di SDN 25 Palu.....	49
C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS	63

	D. Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana BOS di SDN 25 Palu ..	71
BABV	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Implikasi Penelitian.....	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	12
2. Daftar Kepala Sekolah di SDN 25 Palu	43
3. Keadaan Guru di SDN 25 Palu	45
4. Keadaan Siswa di SDN 25 Palu	45
5. Jumlah Ruangan di SDN 25 Palu	46
6. Infrastruktur di SDN 25 Palu	46
7. Jumlah Rumah Dinas di SDN 25 Palu	47
8. Sanitasi dan Air Bersih di SDN 25 Palu	47
9. Sumber Air Bersih di SDN 25 Palu	47
10. Sumber Listrik di SDN 25 Palu	48
11. Alat Penunjang KMB di SDN 25 Palu	48
12. Alat Mesin Kantor di SDN 25 Palu	49

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran 31
2. Model Analisis Data dari Milles dan Huberman..... 39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Uraian Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah tahun 2024
5. LPJ SDN 25 Palu tahun 2024
6. Draf Pengajuan Judul
7. Blangko Pengajuan Judul
8. Surat Penelitian dari Kampus
9. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Ainin Mawaddah
NIM : 20.5.15.0211
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur, Kota Palu

Pengelolaan BOS yang kurang transparan dan bertanggung jawab menunjukkan kemungkinan adanya penyalahgunaan dana, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan target yang diharapkan. Program dana BOS yang dilaksanakan pemerintah kadang menimbulkan permasalahan di bidang pendidikan, mulai dari pengelolaan dana yang tidak efektif karena alokasi yang tidak sesuai kebutuhan dan lemahnya pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana transparansi diterapkan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur, Kota Palu. Transparansi dalam konteks ini mencakup keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan sekolah, seperti guru, komite sekolah, dan orang tua siswa, serta sejauh mana pihak-pihak tersebut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada kepala sekolah, bendahara BOS, dan salah satu guru. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 25 Palu Timur telah menerapkan prinsip transparansi melalui keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), penyampaian informasi dalam forum rapat, serta dokumentasi terbuka. Akuntabilitas juga tercermin dari pelaporan keuangan yang sistematis, tertib, dan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan, serta tidak pernah mengalami revisi laporan. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana dari pemerintah dan beban ganda bendahara yang berpotensi menghambat kelancaran administrasi.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa tata kelola dana BOS yang akuntabel dan transparan dapat terwujud apabila didukung oleh koordinasi yang baik, sistem pelaporan yang jelas, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan SDN 25 Palu Timur dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam pengelolaan dana BOS secara profesional

. BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dapat memberikan harapan dan peluang yang lebih baik di masa depan. Hal ini mendorong berbagai upaya dan perhatian dari seluruh golongan masyarakat dalam setiap gerak langkah dan perkembangan di dunia pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yang pada dasarnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.¹

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus diikuti oleh semua orang. Dengan pendidikan yang memadai, seseorang akan memiliki kompetensi untuk menjawab tantangan-tantangan global dalam kehidupan.² Akan tetapi pada era globalisasi sekarang ini, pendidikan menjadi sesuatu yang mahal bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah di golongan ekonomi lemah. Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah di bidang pendidikan. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, kualitas pengajaran, serta aksesibilitas

¹ Sirait, Jannes Eduard, and Leorince Leorince. "Institusi Pendidikan Kristen Sebagai Pilar Kemerdekaan Pendidikan di Indonesia." *Diegesis: Jurnal Teologi* 9.2 (2024): 207-231.

² Siahaan, Amiruddin, Rahmat Hidayat, and Rustam Rustam. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam: Menuju Lembaga Pendidikan Unggul, Kompetitif Dan Bermutu." (2019). 4-5

pendidikan bagi masyarakat atau ekonomi kebawah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.³

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 3, menyebutkan bahwa salah satu komponen dari biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, kenyataannya, implementasi kebijakan tersebut sering kali menemui hambatan. Salah satu gap fenomena yang muncul adalah ketidaksesuaian antara alokasi dana pendidikan dengan kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan. Meskipun tujuan pendidikan nasional telah ditetapkan dengan jelas dalam Pasal 3

³ Sine, Eka Puteri, Maria Elerina Douk Tunti, and Sarinah Joyce Margaret Rafael. "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (Studi pada sekolah di Kota Kupang)." *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 9.1 (2021): 1-8.

UU No. 20/2003, penerapan dan pengelolaan dana BOS masih menghadapi kendala dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya di tingkat sekolah, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu.⁴

Salah satu sumber pendanaan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Non Personalia, BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.⁵

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas, pemerintah mengalokasikan dana kepada lembaga pendidikan Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk pemerataan Pendidikan. Masyitah menyatakan bahwa untuk mencapai pemerataan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, dana operasional

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

⁵ Octofrezi, Permana. "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)." *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.2 (2020): 13-38

sekolah diserahkan dari pemerintah dengan harapan untuk meringankan tanggung jawab masyarakat untuk dana sekolah.⁶

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi Satuan Pendidikan. Dana ini berfungsi sebagai instrumen keuangan yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam membiayai berbagai kegiatan operasional, termasuk pembelian buku, peralatan, serta pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Dana BOS juga digunakan oleh peserta didik yang kurang mampu, dengan membebaskan mereka dari biaya pendidikan yang dapat menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan

Sejalan dengan program wajib belajar ini, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) sebagai bentuk implementasi. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibuat pemerintah pada tahun 2005 dengan tujuan agar biaya pendidikan dapat diringankan dan dibebaskan kepada siswa yang kurang mampu serta pemerataan pendidikan untuk semua warga negara tanpa terkecuali.⁷

Peran pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan mutu suatu bangsa. Pendidikan merupakan suatu investasi dalam bentuk sumber daya manusia. Operasional pendidikan tidak terlepas dari masalah dana. Pemerintah memberikan

⁶ Sari, Delfa Indah. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

⁷ Dwi Oktavia, Syunu Trihantoyo, Windasari “*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tambaksari I*” *Journal on Education* Mei-Agustus 2023: 16371-16378

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia dengan harapan bahwa dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan bijaksana.

Dengan adanya BOS, diharapkan bahwa setiap sekolah mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dana BOS ini harus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa tujuan utama dari program ini tercapai, yaitu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua siswa.

Untuk memastikan akses yang merata dalam layanan pendidikan dan meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan, pemerintah mengalokasikan dana operasional melalui dana alokasi khusus non fisik. Tujuannya adalah untuk memastikan dana operasional lembaga pendidikan dikelola secara akuntabel dan sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan petunjuk teknis mengenai pengelolaan dana tersebut.

Pengelolaan BOS yang kurang transparan dan bertanggung jawab menunjukkan kemungkinan adanya penyalahgunaan dana, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan target yang diharapkan. Program dana BOS yang dilaksanakan pemerintah kadang menimbulkan permasalahan di bidang pendidikan, mulai dari pengelolaan dana yang tidak efektif karena alokasi yang tidak sesuai kebutuhan dan lemahnya pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Diharapkan efektivitas pengelolaan dana BOS dapat ditingkatkan,

sehingga tujuan utama dari program ini, yaitu peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan, dapat tercapai.⁸

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ikut serta dalam membantu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disediakan oleh pemerintah pusat untuk disalurkan ke sekolah-sekolah yang telah terdaftar sebagai calon penerima dana BOS. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Standar Nasional Pendidikan (SNP).⁹

SDN 25 Palu Timur sebagai lembaga formal pendidikan di Indonesia, mempunyai peran penting untuk mendukung pembangunan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan dana BOS menjadi salah satu sumber dana utama bagi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas pendidikan menjamin setiap individu dalam masyarakat umum memiliki peluang sama untuk mendapatkan pendidikan.

⁸ Sudyartini, Zaenal Wafa “Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta” *Journal on Education* Maret-April 2024: 17807-17816

⁹ Sulfiati F, Andi Samsu Alam, Andi Lukman Irwan “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai”

Dari sisi penelitian, meskipun sudah banyak studi yang membahas tentang penggunaan dana BOS di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengkhususkan pada pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah tertentu, seperti SDN 25 Palu Timur. Penelitian-penelitian yang ada lebih banyak fokus pada aspek kebijakan secara umum atau pada analisis tingkat nasional, sementara sedikit sekali yang mengkaji secara mendalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah dasar tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi gap tersebut dengan mengkaji secara spesifik bagaimana pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Palu Timur merupakan unsur penting dalam menjaga integritas serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Penerapan kedua prinsip ini memungkinkan seluruh pihak yang terlibat baik internal sekolah maupun eksternal seperti orang tua siswa, komite sekolah, dan instansi pemerintah—untuk memahami secara jelas bagaimana Dana BOS dialokasikan dan digunakan. Transparansi memberikan ruang keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas memastikan adanya tanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Dengan demikian, dana yang dikelola dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pendidikan dan diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran. Selain itu, hal ini juga menjadi

mekanisme pengawasan publik yang mendorong pihak sekolah untuk tetap konsisten dalam pengelolaan dana sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹⁰

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat judul *Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, Maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana transparansi dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut?
3. Bagaimana akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 palu timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transparansi dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut.

¹⁰ Kaligis, Elivira Amelia, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 12.2 (2021): 207-224.

3. Untuk mengetahui akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya
2. Secara Praktis, Penelitian ini Memberikan gambaran tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di bawah sekolah naungannya. Serta Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di masing-masing sekolah. Dan Memberikan inspirasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS di sekolah masing-masing.
3. Bagi Penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam melatih penulis menerapkan teori-teori yang di peroleh selama perkuliahan
4. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dana BOS dan memberikan informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam penyaluran dana BOS di lembaga pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pengertian dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini maka ada beberapa kata yang harus di perjelas untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru:

1. Transparansi

Transparansi yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi pengambilan keputusan, khususnya penggunaan Dana BOS. Hal ini mencakup kemudahan akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dan penggunaan Dana BOS termasuk kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana tersebut.

3. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yaitu program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

F. Garis-Garis Besar Isi

Garis-garis besar isi dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis agar memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap topik penelitian.

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, terutama terkait dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di lingkungan sekolah dasar. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah, serta sistematika penulisan yang menguraikan alur isi skripsi secara keseluruhan.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat landasan teori yang digunakan untuk membangun pemahaman konseptual mengenai transparansi, akuntabilitas, dan dana BOS. Bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat dasar teori, serta penyusunan kerangka pemikiran sebagai acuan dalam analisis data.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan pendekatan dan desain penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, serta teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik analisis data yang digunakan, keabsahan data dan tahapan atau prosedur dalam melaksanakan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu SDN 25 Palu Timur, termasuk profil sekolah, jumlah guru dan siswa, serta struktur organisasi. Selanjutnya, disajikan hasil temuan penelitian terkait penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS, yang dianalisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Bab ini juga membahas faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dana BOS serta sejauh mana pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Bab V Penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi secara akademis dan praktis terkait pengelolaan dana BOS, serta saran bagi pihak-pihak terkait, terutama pengelola sekolah dan pemangku kebijakan, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil yang digunakan sebagai acuan dari peneliti di dalam melakukan penelitiannya terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan teori maupun metode peneliti yang digunakan. Selain itu, penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Peneliti	Firmansyah Hidayat, Ismail Tolla ¹ (2022)
	Judul Penelitian	Transparansi Dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
	Perbedaan	1. Tempat dan Waktu Penelitian 2. Objek Penelitian
	Persamaan	1. Penelitian kualitatif 2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 3. Transparansi dan Akuntabilitas

¹ Hidayat, Firmansyah, and Ismail Tolla. "Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* 3.1 (2022): 66-74.

	Hasil	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi penggunaan dana BOS di SMA Negeri 11 Pinrang serta pada penggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka. Hal ini dapat diketahui bahwa pada proses penggunaannya dilaporkan pada Dinas Pendidikan secara offline maupun online. Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan secara triwulan. Penerapan prinsip akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh SMA Negeri 11 Pinrang, pada penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis dana BOS yang menjadi kebijakan pemerintah, dalam pertanggung jawabannya sekolah melakukan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dengan adanya pertanggung jawaban tersebut menjadi cerminan sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga menumbuhkan kepercayaan oleh masyarakat terhadap sekolah.</p>
--	-------	--

2	Peneliti	Fransiscus N.Naiola, Wilsna Rupilu, Agusta A Wulandari, dan Tiffany N P Gah ² (2023)
	Judul Penelitian	TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Kasus pada MI Al-Islamiyah Atambua)
	Perbedaan	Lokasi dan Waktu penelitian
	Persamaan	1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2. Penelitian kualitatif
	Hasil penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah cukup baik yaitu adanya RKAM dana BOS dalam perencanaan. Kepatuhan terhadap ketentuan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS serta realisasi dan keberhasilannya, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, pemerintah daerah/kota, dan pemerintah. Proses pencairan sesuai dengan ketentuan atau petunjuk teknis dalam pengelolaan ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui apakah

² Naiola, F. N., Rupilu, W., Wulandari, A. A., & Gah, T. N. (2023). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BOS (Studi Kasus pada MI Al-Islamiyah Atambua). *JAKA-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 6(1), 81-93.

		MI Al-Islamiyah Atambua telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Penelitian ini dilakukan di MI Al-Islamiyah Atambua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumen, dengan mewawancarai beberapa narasumber antara lain: Kepala Sekolah, Bendahara dan Kepala Sekolah dana BOS, Guru dan Siswa di MI Al-Islamiyah Atambua.
--	--	---

3	Peneliti	Siti Hawa Rahma Sari ³ (2023)
	Judul Penelitian	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIS Perguruan Ubudiyah Medan
	Perbedaan	Tempat dan Waktu penelitian
	Persamaan	1. Penelitian Kualitatif 2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

³ Pane, Siti Hawa Rahma Sari. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Mis Perguruan Ubudiyah Medan*. Diss. State Islamic University of North Sumatera, 2023.

	Hasil	<p>Hasil penelitian bahwa bantuan operasional sekolah (BOS) program di bidang, harus di gunakan seefektif mungkin agar tujuan tercapai. Dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode), berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Miss Perguruan Ubudiyah. Metode pengumpulan data menggunakan data primer. Tektik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa narasumber yaitu: Kepala Sekolah, Bendahara, dan Komite Sekolah secara murni serta dokumentasi sebagai penunjang keabsahan informasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di Mis Perguruan Ubudiyah sudah berjalan dengan cukup baik sesuai permendikbud No.18 tahun 2019 yaitu, adanya keterlibatan tim manajemen BOS, komite sekolah dan seluruh guru dalam</p>
--	-------	--

		<p>perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2019, pertanggung jawaban dana BOS dilakukan setiap triwulan akan tetapi transparansinya belum berjalan dengan baik.</p>
--	--	---

B. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Menurut Dani Rachman pengertian transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraan, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dapat menciptakan timbal balik antara pemerintah, masyarakat orang tua dan warga sekolah melalui penyediaan informasi.⁴

Menurut Ultrafiah transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sementara itu Ardiyanti menyatakan transparansi sebagai prinsip membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai

⁴ Rachman, Dani, Djodi Setiawan, and Reza Maftuh Taufik Nugraha. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Sasama." *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 13.03 (2022): 73-86.

penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.⁵ Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah.⁶

Menurut Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.⁷

2. Tujuan Transparansi

Adapun tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan peyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

⁵ Temalagi, Selva, and Revi W. Silooy. "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru." *Accounting Research Unit (ARU Journal)* 3.1 (2022): 39-53.

⁶ Fajar Panuluh, Garda "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" (2020)

⁷ Mualifu, Mualifu, Ahmad Guspul, and Hermawan Hermawan. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 1.1 (2019): 49-59.

- d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.⁸

3. Manfaat Transparansi

Ada beberapa manfaat adanya transparansi, yaitu :

- a. Mencegah tindakan korupsi.
- b. Membangun tingkat kepercayaan pada komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan tertentu.
- c. Memperkuat kesatuan sosial dengan membentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- d. Mempermudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kebijakan yang ada.
- e. Meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam menilai kinerja pemerintah.⁹

4. Indikator Transparansi

Menurut IDASSA yang dikutip oleh Nico bahas keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator sebagai berikut:

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - 1) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi

⁸ Angkouw, Fini Agustina Dorci, Daisy SM Engka, and Ita Pingkan F. Rorong. "Analisis Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Tontaletle Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23.1 (2023): 13-24.

⁹ Arwani, Agus, and Unggul Priyadi. "Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2.2 (2024): 23-37.

- 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal
- b. Adanya basis legal untuk pajak
- 1) Adanya basis legal untuk mempertanggungjawabkan belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah pajak
 - 2) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.¹⁰
- c. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
 - 2) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 - 3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang
 - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
 - 5) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual.¹¹
- d. Adanya audit yang independen dan efektif.
- 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas

¹⁰ Lailia, Umi Nur. *Analisis prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

¹¹ Setyanto, Roberthus, Siti Ridloah, and A. Suryasai. "Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang." *JMM UNRAM-Master of Management Journal* 11.3 (2022).

- 3) Adanya sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
- 4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- 5) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran
- 6) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.¹²

C. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban mengenai tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Ini melibatkan proses di mana individu atau badan hukum, termasuk pimpinan suatu organisasi, harus memberikan laporan atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.¹³

Akuntabilitas merupakan istilah yang berasal dari kata *account* yang berarti catatan atau laporan dan *ability* yang berarti kemampuan. Akuntabilitas (*accountability*) secara umum dapat diartikan suatu bentuk pertanggung jawaban. Akuntabilitas adalah konsep yang menuntut pertanggung jawaban dari pihak yang diberi amanah, terutama dalam pengelolaan dana dan sumber daya lainnya.¹⁴ Dalam

¹² Nico Adrianto, *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e - Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 21-22.

¹³ Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan mataram tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 166-174.

¹⁴ Tandililing, Juliana. "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah terhadap motivasi mengajar guru di Kabupaten Keerom." *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 4.2 (2019): 38-57.

konteks sekolah, akuntabilitas berarti sekolah harus mampu memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada para stakeholder, baik internal (guru, karyawan) maupun eksternal (orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas). Dana yang dikelola oleh sekolah berasal dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan orang tua siswa, sehingga pengelolaan yang akuntabel akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Sekolah atau madrasah yang menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik menunjukkan bahwa mereka menjalankan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana yang tepat akan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa sumber, akuntabilitas juga mengacu pada kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk melaporkan semua aktivitas kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang berhak meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban sekolah dalam pengelolaan sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik.¹⁵

2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan Akuntabilitas menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya

¹⁵ Siti Hawa Rahma Sari “*Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIS Perguruan Ubudiyah Medan*” (2023)

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.¹⁶

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula.¹⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

Dalam buku petunjuk teknis bantuan operasional sekolah, dikemukakan bahwa tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja sekolah. Manajemen suatu organisasi harus “*accountable*” untuk:

- a. Menentukan tujuan yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

¹⁶ Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. “Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan”. (2023)

¹⁷ Viktoria, Tomi. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan." *Jurnal Pendidikan Teknik Mekatronika* 5.4 (2015).

d. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.¹⁸

Dari adanya uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntabilitas menciptakan kepercayaan stakeholders dalam pengelolaan keuangan, menetapkan tujuan dan sasaran yang tepat, dan menggunakan standar dalam proses dan tujuan kegiatan.

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.¹⁹

3. Manfaat Akuntabilitas

Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk:

- a. Menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- b. Memotivasi terciptanya transparansi dan *responsiveness organisasi*.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat.

¹⁸ Mifta Indah Wahinun. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Mi Roudlotus Salam*. Diss. Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 2019.

¹⁹ Slamet Suyanto, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005), 5

- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

4. Indikator Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dapat dicapai berdasarkan indikator dan alat ukur yang telah ditentukan.²⁰ Berikut ini beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur akuntabilitas:

- a. Proses pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- d. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
- e. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa.

²⁰ Viktoria, T. (2015). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan. *Jurnal Pendidikan Teknik Mekatronika*, 5(4).

- f. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme penganduan masyarakat.
- g. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

D. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program bantuan wajib belajar dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung operasional pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Dana ini diberikan kepada sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional non-personalia, seperti pembelian alat tulis, perbaikan fasilitas sekolah, pengadaan bahan ajar, dan biaya kegiatan pembelajaran lainnya.²¹

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai pada tahun 2005. Program ini diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar serta menengah di seluruh Indonesia.²² Sejak awal peluncurannya, Dana Bos telah menjadi salah satu program andalan pemerintah dalam mendukung operasional sekolah-sekolah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Program ini terus berkembang dengan penyempurnaan dan penyesuaian agar lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh siswa.

²¹ Nurrochman, Taufik, et al. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2023): 60-70.

²² Suharto, Edi. "Peran perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia: Studi kasus program keluarga harapan." *Jurnal Sosiohumaniora* 17.1 (2015): 22-28.

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap perubahan sebuah negara, kemudian mampu meningkatkan kemampuan warga negara yang bertanggung jawab, melalui siklus perubahan kemajuan dan menciptakan siswa semakin terpenggil untuk kemajuan pendidikan, baik secara perorangan meliputi masyarakat luas akan mengantarkannya menjadi insan-insan yang bersaing secara unggul. Sebagian warga negara merupakan pelindung orang banyak yang wajib meningkatkan mutu pendidikan Dan harga diri orang banyak semakin meningkat.

Sekolah menjadi tempat untuk menempa generasi-generasi bangsa yang diharapkan di kemudian hari akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Kebijakan wajib belajar 9 (Sembilan tahun) yang dikeluarkan pemerintah menjadi bukti akan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memajukan bangsa ini melalui sekolah Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh karea itu, mulai tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Sebagaimana diketahui bahwa dana BOS bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam pendidikan, terlebih bagi orang yang tidak mampu.²³

2. Tujuan Pengelolaan Dana BOS

Tujuan pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah untuk mendukung operasional sekolah agar dapat memberikan pelayanan pendidikan

²³ Ridha Albiy, Yahya “Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 19” Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2277 - 2286

yang lebih baik kepada siswa. Berikut adalah beberapa tujuan utama pengelolaan dana BOS:

a. Meningkatkan Akses Pendidikan

Dana BOS bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah mendapatkan akses ke pendidikan dasar yang layak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

b. Meningkatkan Mutu Pendidikan

Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dengan mendanai berbagai kebutuhan, seperti pembelian buku, alat peraga, peningkatan kompetensi guru dan fasilitas pendidikan lainnya.

c. Mendukung Operasional Sekolah

Dana BOS digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan operasional sekolah, termasuk pembayaran listrik, air, perawatan sekolah, dan keperluan administrasi lainnya.

d. Mencegah Putus Sekolah

Dengan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, dana BOS diharapkan dapat mencegah anak-anak putus sekolah karena alasan ekonomi.

e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan dana BOS diatur agar dilakukan secara transparansi dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.²⁴

2. Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Akuntabilitas
- c. Efektivitas
- d. Efisien.²⁵

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Dana BOS

Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

a. Faktor Penghambat :

- 1) Kapasitas manajemen yang lemah

Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki tenaga administrasi yang terlatih untuk mengelola dana BOS dengan baik.

- 2) Minimnya pengawasan

²⁴ Nugraha, Aditya, Nurul Khoiriah Hairani, and Rizki Prisila. "Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas." *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3.2 (2023): 75-80.

²⁵ Suryadi, Nurafni I., Ventje Ilat, and Lidia M. Mawikere. "Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11.1 (2023): 855-865.

Pengawasan yang kurang ketat dari pemerintah atau lembaga terkait dapat memicu penyimpangan dan kurangnya akuntabilitas

3) Transparansi yang buruk

Banyak sekolah yang tidak mempublikasikan secara jelas penggunaan dana BOS, membuat masyarakat pemangku kepentingan sulit memantau

4) Penyalahgunaan dana

Terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana untuk keperluan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁶

b. Faktor Pendukung :

ii. Pelatihan pengelola dana

Program pelatihan dan pendampingan bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS.

iii. Penggunaan Sistem Teknologi Informasi

Sistem digital seperti SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) dan pelaporan daring membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

iv. Pengawasan Aktif

Pengawasan rutin dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS untuk meningkatkan akuntabilitas.

v. Audit dan evaluasi berkala

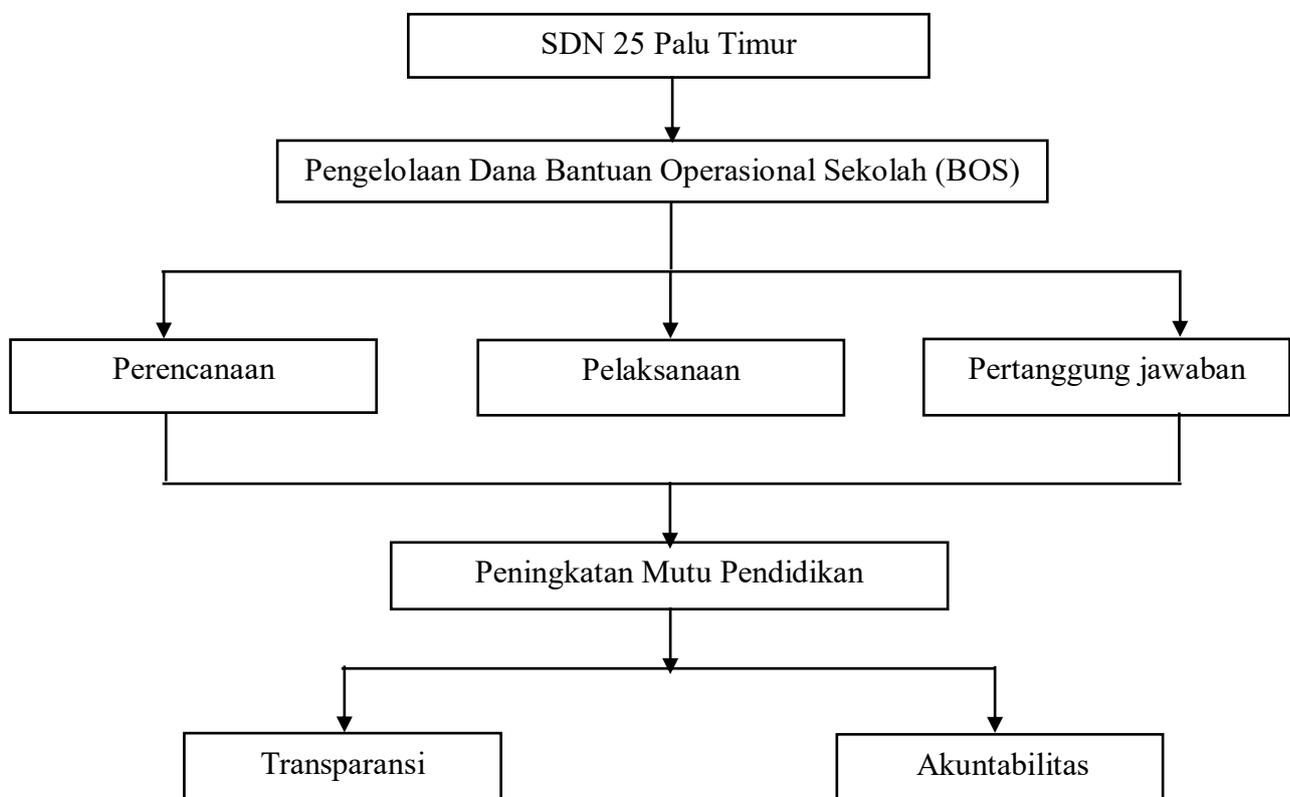
²⁶ Mawar, Retnowati WD Tuti, Nida Handayani, Muhammad Sahrul, Hubungan Kelembagaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar, Cet ke-1, Jakarta, Oktober 2018. 232

Pemeriksaan secara berkala oleh lembaga audit independen membantu memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan aturan.

- vi. Dukungan dari komite sekolah dan masyarakat

Keterlibatan aktif komite sekolah dan masyarakat dalam pengawasan dana BOS mendorong transparansi dan penggunaan yang tepat.²⁷

E. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka penelitian

Kerangka pikir pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur menunjukkan adanya siklus yang sistematis dan terstruktur, yang mencerminkan pelaksanaan tata kelola keuangan sekolah yang baik. Siklus ini mencakup tiga tahap utama, yaitu

²⁷ Kaswita, Elya. *Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, yang saling berkaitan dan dijalankan secara konsisten.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan proses awal dan paling mendasar dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang bertujuan untuk menentukan arah dan strategi penggunaan dana secara terstruktur, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan sekolah. Pada tahap ini, sekolah melakukan identifikasi kebutuhan yang bersifat nyata (*riil*) berdasarkan data dan kondisi aktual di lapangan. Perencanaan yang baik mencerminkan keseriusan sekolah dalam mengelola dana publik secara efektif dan efisien, serta menjadi fondasi bagi keberhasilan pelaksanaan dan pertanggungjawaban di tahap selanjutnya.²⁸

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah proses implementasi atau realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen RKAS. Tahap ini merupakan manifestasi nyata dari perencanaan yang telah disusun, di mana dana BOS digunakan untuk mendanai berbagai program sekolah sesuai prioritas. Pelaksanaan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan penggunaan dana dapat tercapai secara maksimal. Penggunaan dana juga harus mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, serta taat pada aturan yang berlaku.²⁹

²⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Tahun 2024*. Jakarta: Kemendikbudristek. (2024).

²⁹ Permendikbudristek No. 8 Tahun 2025 tentang *Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler*. Diakses melalui: <https://schoolmedia.id/lipsus/4169/permendikdasmen-nomor-8-tahun-2025-terbit-atu-tek-nis-pengelolaan-dana-bos-lebih-transparan-dan-akuntabel>

3. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan dana BOS yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap dana yang telah digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntabel. Pada tahap ini, sekolah diwajibkan menyusun laporan keuangan dan dokumentasi kegiatan secara lengkap dan sistematis. Pertanggungjawaban yang baik mencerminkan kepatuhan sekolah terhadap regulasi, sekaligus memberikan jaminan kepada publik dan pemerintah bahwa dana telah digunakan sesuai tujuan dan peraturan.³⁰

³⁰ PPNews.ID. (2025). *Dana BOS: Ini Regulasi dan 12 Komponen Pembiayaan yang Diatur Pemerintah*. Diakses dari: <https://ppnews.id/2025/04/05/dana-bos-ini-regulasi-dan-12-komponen-pembiayaan-yang-diatur-pemerintah-2>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah.¹ Penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena, perilaku, serta pengalaman manusia secara mendalam dengan cara pengumpulan data yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap situasi tertentu.

2. Desain Penelitian

Desain adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang menghasilkan metode atau *blue print* penelitian. Desain penelitian kualitatif merujuk pada rencana dan struktur yang digunakan untuk menjalankan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Desain ini harus fleksibel dan dinamis karena tujuan utamanya adalah memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis,

¹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018), 91.

mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara atau percakapan biasa, observasi, dan dokumentasi. Datanya bisa berupa kata, gambar, foto, catatan-catatan rapat, dan sebagainya.² Dalam penelitian ini menggunakan desain deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian untuk melakukan penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 25 Palu Timur.

C. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti bertindak menjadi salah satu bagian instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data didalam penelitian. Penulis bertindak sebagai peneliti dengan melakukan wawancara terhadap informan yang di peroleh bentuknya utuh valid.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber pertamanya, yakni diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³

² Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 4.

³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Dalam hal sumber data kedua mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil dari penelitian yang berwujud laporan serta buku-buku tentang hal yang terkait dengan pembahasan penelitian.⁴

2) Sumber Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Penelitian Perpustakaan

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁵

⁴ Nasution, *Metode Research* (Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 144-145.

⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 28.

c. *Internet*

Data-data yang diperoleh dari internet sesuai dengan pokok permasalahan atau berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (*partner* penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitas-aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan *tarecorder dan handycam*.⁶ Observasi dibagi menjadi dua macam, yaitu observasi partisipan dan non partisipan.

Dalam observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009), 90-91.

Teknik observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, yaitu di SDN 25 Palu Timur untuk memenuhi data-data peneliti. Seperti transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan kota palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata dalam pelaksanaan wawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara dibagi menjadi tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi struktur dan wawancara campuran.⁷

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur yaitu sudah termasuk dalam kategori *interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya.

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Sasaran dalam metode wawancara ini adalah di SDN 25 palu timur guna dimintai keterangan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kota palu.

⁷ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Ed. 1, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 66.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁸

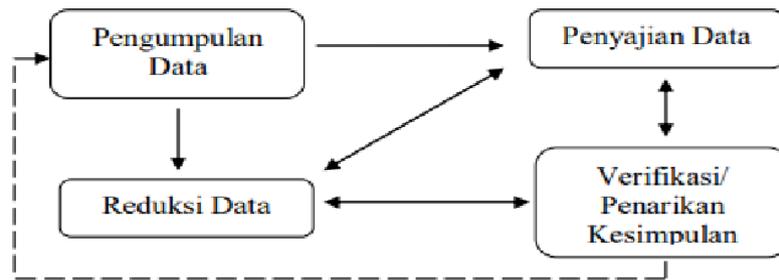
Dalam dokumentasi penulis mengambil gambar pada saat dilakukannya penelitian hal ini bertujuan untuk menguatkan masalah yang diteliti. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan catatan kecil lapangan.⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan model analisis dari Milles dan Huberman yang terdiri dari empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

⁸ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 152.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 45



Gambar 3.1 Model Analisis Data dari Milles dan Huberman

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data perlu segera dianalisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sehingga data yang diperoleh banyak dan bisa saja berbeda. Reduksi dapat dilakukan dengan proses pengkodean manual. Istilah coding merupakan proses penerapan kode pada data hasil wawancara sehingga data dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil wawancara.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah tahap reduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Penyajian data memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian ini juga memudahkan peneliti Menyusun kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data

adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis masalah ini adalah peneliti membuat penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data sebelumnya diperiksa kembali untuk melihat validitas data dan telah sesuai menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dimana kesimpulan awal telah didukung dengan data-data yang akurat, konsisten dan kredibel.¹⁰

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang di peroleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu di cek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengecek kesesuaian sumber data yang di peroleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

¹⁰ Eka Puteri Trisita Sine, Maria E.D. Tunti, Sarinah Joyce Margaret Rafael “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (STUDI PADA SEKOLAH DI KOTA KUPANG)” Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas (2021)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat SDN 25 Palu

SDN 25 Palu terletak di lingkungan Bumi Sagu, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur. Pada masa kepemimpinan Dra. Hj. Hartin Mado, dilakukan pemugaran enam sekolah yang berada di kompleks tersebut, yaitu:

- a. SDN 15 Palu
- b. SDN 25 Palu
- c. SDN 28 Palu
- d. SDN Bumi Sagu I
- e. SDN Bumi Sagu II
- f. SDN Bumi Sagu III

Pemugaran tersebut menghasilkan dua sekolah baru, yakni SDN 15 Palu dan SDN Inpres Bumi Sagu. Pada tanggal 17 Juli 2004, guru bantu dari SDN Inpres Bumi Sagu menerima Nota Tugas dari Dinas Pendidikan Kota Palu untuk segera bertugas di SDN 25 Palu. Bersama Ibu Zulmin, S.Pd, mereka segera membuka pendaftaran siswa baru. Karena bangunan SDN 25 Palu belum rampung, proses belajar mengajar sementara ditumpangkan di SDN 15 Palu di bawah pimpinan Hj. Intjenuri Jurampole. Bangunan yang dijanjikan selesai dalam 90 hari, baru rampung setelah 7 bulan.

Akhirnya, pada 21 Februari 2005, kegiatan belajar mengajar resmi dipindahkan ke gedung SDN 25 Palu, dengan jumlah 43 siswa dan 2 rombongan belajar. Sebelumnya, pada 19–20 Februari 2005, dilakukan pembersihan ruangan

dan doa bersama yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan, staf, dan anggota Dharma Wanita. Kurang lebih 1 bulan 8 hari setelah menjabat sebagai PLH (Pelaksana Harian), kepala sekolah dilantik secara definitif pada 29 Maret 2005 dan resmi memikul tugas tambahan sebagai kepala sekolah SDN 25 Palu. Berikut daftar kepala sekolah yang telah menjabat di SD Negeri 25 Palu:

Tabel 4.1 Daftar Kepala Sekolah SDN 25 Palu

No.	Nama	Tahun Menjabat
1	Masniar, S.Pd	2005 hingga tahun 2015
2	Mariaty Datumusu, S.Pd	Mei 2015 hingga Januari 2019
3	Hikmah Tomodu, S.Pd., M.Pd	Januari 2019 hingga Mei 2019
4	Alderis Lumantow, S.Pd., M.Si	Mei 2019 hingga April 2022
5	Dra Hadiah	April 2022 hingga September 2022
6	Zulmin, S.Pd. SD., M.Pd.	Oktober 2022 hingga Sekarang

Sumber Data: Arsip SDN 25 Palu

2. Visi dan Misi SDN 25 Palu

Visi Sekolah

“Unggul Dalam Mutu, Berprestasi, Berbudaya Lingkungan dan Berkarakter Profil Pelajar Pancasila”

Misi Sekolah

- a. Mewujudkan peserta didik yang religious
- b. Mewujudkan peserta didik yang bermutu dan Berkarakter Pelajar Pancasila
- c. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif
- d. Mewujudkan prestasi dalam bidang akademik dan non akademik
- e. Mewujudkan peserta didik yang Peduli Lingkungan
- f. Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.
- g. Mewujudkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
- h. Mewujudkan manajemen sekolah secara transparan dan akuntabel

- i. Mewujudkan perangkat kurikulum dan sistem penilaian sekolah yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional
- j. Mewujudkan peserta didik untuk peduli terhadap lingkungan hidup
- k. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan masyarakat
- l. Mewujudkan suasana pembelajaran yang adaptis terhadap kondisi Darurat (Bencana alam dan wabah penyakit)

3. Profil Sekolah

a. Identitas SDN 25 Palu

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SDN 25 Palu |
| 2. Alamat | : | Jln. Otto Iskandardinata Lrg Lestari No. 7. |
| Kecamatan | : | Palu Timur |
| Kab/ Kota | : | Sulawesi Tengah |
| Provinsi | : | Sulawesi Tengah |
| No. Telepon | : | (0451) |
| E-Mail | : | Sdn25palu2020@gmail.com
Sdn25_palu@yahoo.com |
| 3. Nama Yayasan | : | - |
| 4. Status Sekolah | : | Negeri |
| 5. SK Kelembagaan | : | tanggal |
| 6. NSS | : | 101186013025 |
| 7. NPSN | : | 40203557 |
| 8. Tipe Sekolah | : | A |
| 9. Tahun Pendidikan/ Beroperasi | : | 2005 |
| 10. Status Tanah | : | Pemerintah |
| 11. Luas Tanah | : | 65 m x 66 m = 4.290 M ² |
| 12. Nama Kepala Sekolah (Plt) | : | Zulmin, S.Pd. SD., M.Pd. |
| 13. Nomor SK | : | |

b. Keadaan Guru

Tabel 4.2 Keadaan Guru di SDN 25 Palu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru				Jlh
		GT / PNS		GTT / Guru Bantu		
		L	P	L	P	
1.	S3 / S2	-	-	-	-	-
2.	S1	4	21	-	2	27
3.	D4	-	-	-	-	-
4.	D3 / Sarmud	-	-	-	-	-
5.	D2	-	-	-	-	-
6.	D1	-	-	-	-	-
7.	≤ SMA / Sederajat	-	-	-	-	-
Jumlah		4	21	-	2	27

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

c. Keadaan Siswa (3 tahun terakhir)

Tabel 4.3 Keadaan Siswa di SDN 25 Palu

Tahun Pelajaran	Pendaftar Calon Siswa Baru	Kelas I				Kelas II			
		Jumlah Siswa			Jlh Rombel	Jumlah Siswa			Jlh Rombel
		L	P	Jlh		L	P	Jlh	
2020/2021	86	33	37	70	3	30	23	53	3
2021/2022	59	27	23	57	2	33	37	70	3
2022/2023	82	37	35	72	3	27	23	57	2

Tahun Pelajaran	Kelas V				Kelas VI			
	Jumlah Siswa			Jlh Rombel	Jumlah Siswa			Jlh Rombel
	L	P	Jlh		L	P	Jlh	
2020/2021	39	34	73	3	41	33	74	3
2021/2022	31	44	75	3	31	30	62	2
2022/2023	52	29	81	3	31	44	75	3

Tahun Pelajaran	Kelas III	Kelas IV

	Jumlah Siswa			Jlh Rombel	Jumlah Siswa			Jlh Rombel
	L	P	Jlh		L	P	Jlh	
	2020/2021	52	29		81	3	31	
2021/2022	30	23	53	3	52	29	81	3
2022/2023	33	37	70	3	30	23	53	3

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

d. Fasilitas

1) Ruangan

Tabel 4.4 Jumlah Ruangan di SDN 25 Palu

No	Nama Ruangan	Jumlah Ruang	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1.	Ruang kelas	17	1	-	-
2.	Ruang perpustakaan	1	1	-	-
3.	Ruang Tata Usaha	1	1	-	-
4.	Ruang Kepala sekolah	1	1	-	-
5.	UKS	1	1	-	-
6.	Koperasi / Kantin	1	1	-	-
7.	Kamar Mandi	11	3	-	-
8.	Musholah	1	1	-	-
9.	Aula	1	1	-	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

2) Infrastruktur

Tabel 4.5 Infrastruktur di SDN 25 Palu

No	Infrastruktur	Jumlah	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1.	Pagar depan	1		1	
2.	Pagar samping	1			1
3.	Pagar belakang	1			1
4.	Tiang bendera	1	1		
5.	Reservoir / menara air	2	2		

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

3) Rumah Dinas

Tabel 4.6 Jumlah Rumah Dinas di SDN 25 Palu

No	Jenis Bangunan	Jumlah	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1.	Rumdin Kepala Sekolah	-	-	-	-
2.	Rumdin Guru	-	-	-	-
3.	Rumdin Penjaga Sekolah	1	-	1	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

4) Sanitasi dan Air Bersih

Tabel 4.7 Sanitasi dan Air Bersih di SDN 25 Palu

No	Ruang / Fasilitas	Jumlah	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1.	KM / WC Siswa Putra / i	10	-	2	-
2.	KM / WC Guru	2	2	-	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

5) Sumber Air Bersih

Tabel 4.8 Sumber Air Bersih SDN 25 Palu

No	Ruang / Fasilitas	Jumlah	Kondisi		
			Baik	RR	RB
1.	Sumur dengan pompa listrik	1	1	-	-
2.	Sumur tanpa pompa listrik	-	-	-	-
3.	Tada hujan	-	-	-	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

6) Sumber Listrik

Tabel 4.9 Sumber Listrik SDN 25 Palu

No	Fasilitas	Jumlah	Kondisi				
			Berfungsi	Tidak	Baik	RR	RB
1.	Lampu TL	28	28	-	-	-	-
2.	Lampu Pijar	-	-	-	-	-	-
3.	Stop Kontak	4	4	-	-	-	-
4.	Instalasi Listrik	ada	√	-	-	-	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

7) Alat Penunjang KBM

Tabel 4.11 Alat Penunjang KBM

No	Jenis Alat Peraga	Jumlah	Pemangfaatan Alat			Kondisi		
			Dipakai	Tidak	Jarang	B	RR	RB
1.	B. Indo	3 set	√	-	-	√	-	-
2.	MTK	4 set	√	-	-	√	-	-
3.	IPA	11 set	√	-	-	√	-	-
4.	IPS	10 set	√	-	-	√	-	-
5.	Kesenian	3 set	√	-	-	√	-	-
6.	Pend. Agama	-	√	-	-	√	-	-
7.	PJOK	7 set	√	-	-	√	-	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

8) Alat Mesin Kantor

Tabel 4.12 Alat Mesin Kantor

No	Jenis Alat	Jumlah	Pemangfaatan Alat			Kondisi		
			Dipakai	Tidak	Jarang	B	RR	RB
1.	Infokus	3	3	-	-	3	-	-
2.	Komputer	3	3	-	-	3	-	-
3.	Laptop	5	5	-	-	5	-	-
4.	Chrome Book	15	15	-	-	15	-	-
5.	Printer	4	4	-	-	4	-	-
6.	TV LED	2	2	-	-	2	-	-
7.	Layar Infokus	2	2	-	-	2	-	-

Sumber: Data Arsip SDN 25 Palu

B. Transparansi dalam Penggunaan Dana BOS di SDN 25 Palu

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transparansi dalam konteks ini berarti keterbukaan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan, baik internal (kepala sekolah, guru, staf, komite sekolah) maupun eksternal (Dinas Pendidikan, masyarakat, dan orang tua siswa), terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS.

Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SDN 25 telah menjalankan proses pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa “pendanaan

pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.” Ayat (3) dalam pasal yang sama juga menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Salah satu bentuk nyata dari transparansi tersebut adalah mekanisme audit atau pemeriksaan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh bagian keuangan Dinas Pendidikan, bukan oleh inspektorat, selama tidak ditemukan indikasi penyelewengan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten, bagian keuangan, dalam hasil wawancara berikut:

Yang audit atau memeriksa dana BOS di SDN 25 itu dari Dinas Pendidikan bagian keuangan, bukan dari Inspektorat. Kalau pun nanti terjadi penyelewengan atau penggunaan yang tidak sesuai laporan, baru Inspektorat yang turun. Selama ini, karena aman-aman saja, maka auditnya dilakukan oleh pihak keuangan dinas. Proses rekon belanja juga berjalan transparan dan tergolong cepat, baik dalam pengantaran maupun verifikasi laporan pertanggungjawaban (LPJ). Kadang memang ada koreksi kecil seperti rincian SPJ, dokumentasi, tanggal, perhitungan pajak, atau penyesuaian RKAS-nya, terutama terkait kode rekening jenis belanja. Tapi itu biasa dan masih dalam batas wajar.¹

Pernyataan ini juga diperkuat oleh sejumlah guru di SDN 25 yang menyatakan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak internal sekolah. Setiap penyusunan RKAS dan laporan penggunaan dana selalu dikomunikasikan secara kolektif. Dengan mekanisme ini, SDN 25 menunjukkan komitmennya dalam menjalankan prinsip transparansi serta meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran pendidikan, sesuai dengan regulasi dan pengawasan yang berlaku.

¹ Fahrul Gunawan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Jl. Bantilan No.05, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi, wawancara oleh Penulis 4 Agustus 2025.

Secara umum, transparansi dapat terlihat dari proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang seharusnya disusun secara partisipatif, serta disosialisasikan kepada warga sekolah dan komite. Selain itu, keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS dan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara berkala merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana transparansi itu diterapkan.

Praktik transparansi juga meliputi penyediaan informasi yang mudah diakses, pelibatan guru dan staf dalam rapat evaluasi, serta dokumentasi kegiatan yang dapat ditinjau kembali bila diperlukan. Dengan adanya transparansi, diharapkan tidak hanya mencegah penyalahgunaan anggaran, tetapi juga mendorong partisipasi warga sekolah dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan adalah melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun secara partisipatif. Guru dan staf sekolah dilibatkan dalam rapat pembahasan kebutuhan sekolah yang dibiayai melalui dana BOS. Rapat tersebut biasanya dilakukan pada awal tahun anggaran, yang menjadi dasar dalam menyusun RKAS sebagai dokumen acuan penggunaan dana BOS.

Transparansi merupakan prinsip utama dalam tata kelola keuangan yang baik, termasuk dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Di SDN 25 Palu Timur, upaya untuk menerapkan transparansi dalam penggunaan dana BOS telah dilakukan melalui beberapa mekanisme, antara lain pelaporan secara

terbuka, pelibatan komite sekolah, serta pemanfaatan sistem digital untuk pencatatan dan pelaporan anggaran.

Untuk menggambarkan secara langsung bagaimana transparansi dalam penggunaan dana BOS diimplementasikan di SDN 25 Palu Timur, berikut adalah wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 25 Palu Timur, Zulmin, S.Pd. SD., M.Pd.:

“Pertama, kami melakukan analisis terhadap *Rapor Pendidikan*. Dari Rapor Pendidikan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki, sehingga berdasarkan hasil analisis itu, kami menentukan langkah-langkah perencanaan. Setelah itu, kami menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), yang memuat seluruh rencana kegiatan dalam satu tahun. Dari berbagai kegiatan tersebut, kemudian dipilah mana yang dapat dianggarkan dan mana yang tidak. Sebelum menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), saya terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan para guru. Namun, tidak semua kebutuhan guru dapat langsung dipenuhi, melainkan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. Perlu dicatat bahwa tidak semua kebutuhan guru dapat diakomodasi karena ada pembiayaan lain yang juga penting, seperti untuk kegiatan pembinaan siswa. Misalnya, saya rutin mengadakan perlombaan antarkelas setiap hari Jumat sebagai bagian dari program pembinaan.”²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 25 Palu Timur, dijelaskan bahwa proses perencanaan penggunaan dana BOS diawali dengan menganalisis *Rapor Pendidikan*. Dari hasil analisis tersebut, sekolah mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi yang harus segera diperbaiki. Rekomendasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), yang memuat berbagai kegiatan sekolah selama satu tahun ajaran.

Setelah RKT disusun, dilakukan pemilahan kegiatan untuk menentukan mana yang akan dianggarkan dan mana yang tidak. Penyusunan RKAS dilakukan

² Zulmin, Kepala Sekolah SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Lorong Lestari No. 7 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 21 Mei 2025.

secara selektif, diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan guru. Namun, tidak semua kebutuhan guru langsung dipenuhi. Sekolah menerapkan skala prioritas, di mana pemenuhan kebutuhan dilakukan secara bertahap sesuai dengan keterbatasan anggaran dan kebutuhan lainnya yang juga mendesak.

Selain fokus pada kebutuhan guru, kepala sekolah juga memperhatikan kegiatan pembinaan siswa. Salah satu program rutin yang dilaksanakan adalah perlombaan antarkelas setiap hari Jumat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter dan peningkatan semangat belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur dilakukan secara terbuka dan terencana, dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak, serta tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur juga diperkuat oleh pernyataan dari salah satu guru yang mengapresiasi keterbukaan kepala sekolah dalam mengelola dana tersebut. Guru tersebut menyampaikan bahwa kepala sekolah selalu memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait rencana penggunaan dana, alokasi anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh BOS. Hal ini disampaikan dalam kutipan wawancara berikut:

"Ya, kepala sekolah sangat transparan dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana BOS. Setiap ada perencanaan atau realisasi anggaran, kami para guru selalu dilibatkan dalam rapat. Kepala sekolah biasanya menjelaskan alokasi dana, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, serta alasan mengapa kegiatan tersebut dipilih. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi, bukan hanya menerima informasi sepihak, tetapi kami benar-benar diajak berdiskusi. Menurut saya, ini sangat baik karena kami merasa dihargai dan ikut

memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program-program sekolah."³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah tidak hanya menyampaikan informasi secara sepihak, tetapi juga secara aktif membuka ruang partisipasi dan diskusi kepada seluruh guru dalam proses perencanaan dan evaluasi penggunaan dana BOS. Setiap keputusan yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran didiskusikan bersama melalui forum-forum resmi seperti rapat dewan guru atau rapat perencanaan kegiatan sekolah. Dalam forum tersebut, guru-guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, usulan kegiatan, serta memberikan masukan terhadap rencana anggaran yang akan dijalankan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu orang tua siswa. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif dari pihak penerima manfaat yang secara langsung merasakan dampak pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui pernyataan salah satu orang tua siswa berikut:

Dana BOS sekolah dilakukan dengan transparan oleh kepala sekolah. Kami para orang tua siswa, ketika ke kantor sekolah, bisa langsung melihat RKAS karena sudah ditempel di sana. Di SDN 25 Palu ini, kepala sekolah dan bendaharanya sangat transparan dalam pengelolaan dana BOS.⁴

³ Safruddin R. Lamadang, Guru SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 3 Juni 2025.

⁴ Fitri, Orang Tua Siswa SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 3 Juli 2025.

Pernyataan dari salah satu orang tua siswa menunjukkan bahwa SDN 25 Palu telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Transparansi terlihat dari keterbukaan pihak sekolah dalam menyediakan dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dapat diakses oleh orang tua siswa di kantor sekolah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS, yang menekankan bahwa pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan, salah satunya dengan menyediakan informasi penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat.⁵

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	KOMPETENSI LULUSAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
2	ISI PENDIDIKAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
3	PROSES PEMBELAJARAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4	PENILAIAN PENDIDIKAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5	PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
6	SARANA DAN PRASARANA	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
7	PENGLOLAAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
8	PEMBIAYAAN	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
JUMLAH		Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Gambar 4.1 RKAS SDN 25 Palu
(Sumber: SDN 25 Palu)

Praktik keterbukaan ini juga mencerminkan adanya upaya sekolah untuk membangun kepercayaan dengan orang tua siswa sebagai pemangku kepentingan, sehingga meminimalisir kecurigaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Jakarta: Kemendikbud RI.

dalam pengawasan. Dengan demikian, berdasarkan wawancara ini dapat disimpulkan bahwa SDN 25 Palu telah memenuhi indikator transparansi, yakni keterbukaan informasi dan aksesibilitas data penggunaan dana BOS.

Hal ini menjadi salah satu indikator penting bahwa pelaksanaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur dilakukan secara transparan, partisipatif, dan demokratis. Transparansi tersebut tidak hanya terlihat dari penyampaian informasi secara terbuka, tetapi juga dari adanya mekanisme komunikasi dua arah antara pihak manajemen sekolah dengan tenaga pendidik. Guru tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek yang turut bertanggung jawab atas perencanaan dan keberhasilan program-program sekolah yang didanai oleh BOS.

Keterlibatan aktif guru dalam proses pengelolaan dana BOS menjadi wujud nyata dari akuntabilitas internal yang kuat. Dengan keterbukaan ini, para guru merasa memiliki peran dan tanggung jawab moral dalam memastikan dana BOS benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Selain memperkuat hubungan antara manajemen sekolah dan guru, praktik ini juga menciptakan budaya organisasi yang sehat, di mana setiap kebijakan dilandasi oleh musyawarah dan pertimbangan bersama demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur didahului dengan rapat evaluasi dan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan sekolah, khususnya guru, bendahara, dan kepala sekolah. Rapat ini menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, serta prioritas anggaran

yang akan dimuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kegiatan rapat ini dilakukan secara rutin sebelum penyusunan RKAS dan juga dalam tahap evaluasi pelaksanaan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu guru di SDN 25 Palu Timur, yang menyatakan bahwa rapat tersebut memang selalu diadakan sebagai bagian dari proses transparansi dan pelibatan semua unsur sekolah. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Ada, karena membahas tentang RKAS. Biasanya sebelum penyusunan RKAS, kami para guru dilibatkan dalam rapat yang diadakan oleh pihak sekolah. Dalam rapat tersebut, kepala sekolah dan bendahara menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, termasuk bagaimana anggaran akan dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan, terutama terkait kebutuhan pembelajaran di kelas. Jadi, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan kepala sekolah, kami merasa bahwa pendapat dan kebutuhan kami tetap dipertimbangkan dalam penyusunan RKAS."⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Keterlibatan aktif para guru dalam proses ini menunjukkan adanya komitmen dari pihak sekolah untuk membangun tata kelola keuangan yang demokratis dan akuntabel. Pada tahap perencanaan, khususnya dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), guru tidak hanya menerima informasi mengenai alokasi dana, tetapi juga terlibat langsung dalam diskusi dan pengambilan keputusan melalui forum resmi seperti rapat dewan guru.

⁶ Safruddin R. Lamadang, Guru SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 3 Juni 2025.

Kehadiran guru dalam forum tersebut memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa alokasi dana BOS benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Keterlibatan ini juga menciptakan ruang komunikasi yang sehat antara kepala sekolah, bendahara, dan guru sebagai pelaksana utama kegiatan pendidikan. Proses dialog yang terbuka memungkinkan seluruh pihak memahami peran, tanggung jawab, serta keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan realistis.

Selain itu, pelibatan seluruh unsur pendidikan dalam proses perencanaan dan evaluasi turut membangun rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap kebijakan keuangan sekolah. Guru merasa dihargai karena pendapat dan kebutuhannya diperhatikan, sementara pihak manajemen memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi nyata di lapangan. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil pendidikan.

Rapat penyusunan RKAS di SDN 25 Palu Timur menjadi langkah awal dalam menciptakan transparansi pengelolaan dana BOS. Rapat ini bertujuan menyusun dan menyepakati rencana penggunaan dana berdasarkan kebutuhan sekolah selama satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah melibatkan bendahara BOS, komite sekolah, serta seluruh dewan guru. Peran guru sangat penting karena mereka memahami secara langsung kebutuhan pembelajaran, program pengembangan siswa, dan sarana pendukung proses belajar mengajar. Dengan melibatkan guru, proses perencanaan menjadi lebih terbuka, partisipatif,

dan realistis. Hasil dari rapat ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen RKAS yang menjadi acuan resmi penggunaan dana BOS selama satu tahun anggaran.

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS tidak hanya mencakup aspek penggunaan dana, tetapi juga mencakup informasi mengenai asal-usul dana, waktu pencairan, serta mekanisme penyalurannya. Dana BOS berasal dari pemerintah pusat dan disalurkan melalui dinas pendidikan, lalu masuk langsung ke rekening sekolah. Adapun waktu pencairan dana tidak dapat ditentukan secara pasti setiap bulannya karena tergantung pada kebijakan dan kesiapan dari pihak dinas terkait. Pemahaman yang menyeluruh terhadap alur penyaluran dana ini penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau prasangka di kalangan guru dan masyarakat.

Dengan demikian, praktik pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur tidak hanya mencerminkan penerapan prinsip transparansi, tetapi juga membangun budaya organisasi yang berlandaskan kolaborasi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur, penulis juga melakukan wawancara dengan bendahara sekolah selaku pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan BOS. Melalui wawancara ini, diperoleh masukan penting yang dapat dijadikan sebagai saran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS agar lebih terbuka dan akuntabel.

Bendahara sekolah menekankan pentingnya adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara bendahara dan kepala sekolah, terutama dalam hal pembelanjaan

anggaran. Meskipun secara administratif dana BOS dikelola oleh bendahara, namun dalam praktiknya, setiap proses pembelanjaan sebaiknya tetap dikomunikasikan dan disepakati bersama dengan kepala sekolah agar sesuai dengan RKAS dan menghindari kesalahpahaman. Berikut kutipan pernyataan dari bendahara sekolah:

“Saran saya adalah pentingnya membangun sinergi antara bendahara dan kepala sekolah dalam hal pembelanjaan dana BOS. Meskipun secara teknis dana tersebut dikelola oleh bendahara, namun proses penggunaannya tetap harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah, terutama agar selaras dengan perencanaan dalam RKAS. Jika tidak ada sinergi atau koordinasi yang baik, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan kecurigaan antar pihak. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan sangat diperlukan agar pengelolaan dana BOS berjalan dengan efektif, efisien, dan tetap dalam koridor akuntabilitas.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah di SDN 25 Palu Timur, diperoleh masukan yang sangat penting dan relevan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai pihak yang secara langsung menangani pencairan, pembukuan, hingga pelaporan dana BOS, bendahara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap proses penggunaan anggaran berjalan sesuai prosedur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam wawancara tersebut, bendahara menyampaikan bahwa meskipun secara teknis dana BOS memang berada di bawah tanggung jawabnya, namun praktik pelaksanaannya tetap memerlukan sinergi dan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah. Menurutnya, sinergi ini sangat penting agar seluruh

⁷ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 11 Juni 2025.

kegiatan yang direncanakan dalam RKAS dapat dijalankan secara terarah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar pihak. Ia menekankan bahwa setiap pengeluaran dana sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan bersama, agar tidak terjadi kekeliruan administratif atau bahkan ketidaksesuaian dengan perencanaan awal.

Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan teknis pembelanjaan dapat membuka celah terjadinya kesalahpahaman, bahkan kecurigaan antar pihak, baik secara internal maupun eksternal. Dalam kondisi tersebut, bukan hanya efektivitas anggaran yang terganggu, tetapi juga kepercayaan antar unsur sekolah bisa melemah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip keterbukaan, kejelasan peran, dan tanggung jawab yang saling terintegrasi.

Saran yang disampaikan oleh bendahara ini pada dasarnya menekankan pentingnya membangun budaya komunikasi yang terbuka, profesional, dan kolaboratif dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini bukan hanya untuk menghindari kesalahan prosedural, tetapi juga untuk membangun suasana kerja yang sehat dan harmonis antar pemangku kepentingan di lingkungan sekolah.

Dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara konsisten, pengelolaan dana BOS tidak hanya akan memenuhi aspek administratif dan regulatif, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap manajemen sekolah. Oleh sebab itu, penguatan koordinasi antar tim pengelola dana BOS perlu terus dilakukan, termasuk dengan melibatkan guru, komite sekolah, serta pihak terkait lainnya dalam setiap proses perencanaan dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur dapat berjalan lebih

efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur telah diterapkan melalui berbagai mekanisme yang melibatkan seluruh unsur sekolah. Kepala sekolah secara aktif menyampaikan informasi terkait perencanaan, alokasi, dan realisasi penggunaan dana BOS kepada guru dan staf melalui forum resmi seperti rapat dewan guru. Proses ini menunjukkan keterbukaan informasi dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Perencanaan anggaran dimulai dari analisis Rapor Pendidikan dan penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang selanjutnya dituangkan dalam RKAS. Dalam proses ini, kepala sekolah melakukan identifikasi kebutuhan guru dan siswa, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan kondisi dan keterbatasan anggaran. Pelibatan guru dalam proses penyusunan RKAS menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya sebatas penyampaian informasi, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, keterbukaan kepala sekolah dalam menjelaskan setiap kegiatan yang akan didanai oleh BOS, termasuk alasan pemilihan program dan pelaksanaan kegiatan, turut memperkuat rasa tanggung jawab bersama di lingkungan sekolah. Guru-guru merasa dilibatkan dan diberi ruang untuk memberikan masukan, yang pada akhirnya menciptakan iklim kerja yang demokratis dan mendukung terciptanya akuntabilitas internal.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur dapat dikategorikan sebagai baik, karena telah memenuhi unsur keterbukaan informasi, pelibatan aktif, serta komunikasi yang dua arah antara manajemen sekolah dan tenaga pendidik.

Penerapan Indikator Keberhasilan Transparansi (IDASSA) pada Pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Palu:⁸

1. Keterbukaan Informasi

SDN 25 Palu menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS dengan memastikan bahwa setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dilakukan secara terbuka dan partisipatif, melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan perwakilan komite sekolah yang mewakili suara orang tua/wali murid. Proses ini dilakukan melalui rapat resmi yang terjadwal, di mana setiap peserta dapat memberikan masukan dan menyampaikan pendapat mengenai prioritas penggunaan dana.

2. Partisipasi Publik

SDN 25 Palu menempatkan partisipasi publik sebagai salah satu pilar penting dalam pengelolaan dana BOS. Keterlibatan perwakilan Komite Sekolah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menjadi wujud nyata bahwa suara orang tua dan wali murid dihargai serta diakomodasi.

⁸ Teguh Walyono, Harsono dan Suyatmini, Transparansi Penggunaan Dana BOS di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4.1. (2023): 28-37

Proses partisipasi ini dilakukan melalui forum rapat resmi yang dihadiri oleh kepala sekolah, bendahara, guru, dan pengurus komite, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan program, memberikan masukan, dan menilai prioritas kegiatan sekolah. Dengan demikian, perencanaan penggunaan dana BOS tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekolah.



Gambar 4.1 Rapat Mengenai DANA BOS

3. Kelengkapan Informasi

SDN 25 Palu memastikan bahwa seluruh informasi terkait pengelolaan dana BOS disampaikan secara lengkap, terperinci, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kelengkapan informasi ini mencakup rincian sumber dana, jumlah dana yang diterima, tahap penyaluran, periode pencairan, hingga mekanisme transfer langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ke rekening sekolah tanpa perantara. Informasi tersebut tidak hanya memuat angka nominal, tetapi juga menjelaskan peruntukan dana untuk setiap program atau kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disetujui.

Setiap kategori pengeluaran, seperti belanja modal, belanja barang dan jasa, maupun belanja pegawai, diuraikan dengan jelas agar semua pihak dapat

memahami tujuan dan manfaat dari alokasi dana tersebut. Misalnya, belanja modal meliputi pembelian peralatan pembelajaran atau perbaikan sarana sekolah, sedangkan belanja barang dan jasa mencakup kebutuhan operasional seperti buku, alat tulis, listrik, air, dan internet. Kelengkapan informasi ini disajikan dalam dokumen resmi, laporan pertanggungjawaban, serta pertemuan bersama komite sekolah dan orang tua/wali murid. Dengan adanya penyajian informasi yang lengkap, SDN 25 Palu mampu menghindari potensi kesalahpahaman, meminimalisir kecurigaan, dan memastikan bahwa semua penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

4. Keakuratan Informasi

SDN 25 Palu menempatkan keakuratan informasi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana BOS, sehingga setiap data yang disajikan harus sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat diverifikasi. Proses pencatatan penerimaan dan penggunaan dana dilakukan secara cermat oleh bendahara sekolah dengan mengacu pada dokumen resmi, seperti bukti transfer dari pemerintah, kwitansi pembelian, faktur pembayaran, serta daftar hadir kegiatan yang didanai dari BOS. Semua data yang dimasukkan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan aplikasi ARKAS dipastikan sesuai dengan transaksi sebenarnya, tanpa adanya rekayasa atau manipulasi.

5. Kemudahan Akses Informasi

SDN 25 Palu berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal sekolah, dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan dana BOS. Salah satu bentuk upaya

tersebut adalah dengan mengunggah laporan realisasi penggunaan dana secara berkala melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), yang merupakan sistem resmi pelaporan kepada pemerintah. Selain itu, sekolah juga menyediakan salinan laporan yang dapat diakses oleh Komite Sekolah dan orang tua/wali murid melalui pertemuan rutin, rapat evaluasi, atau media fisik seperti papan pengumuman sekolah.

6. Konsistensi Informasi

SDN 25 Palu menjaga konsistensi informasi dalam pengelolaan dana BOS dengan memastikan bahwa setiap laporan, dokumen, dan penyampaian data selalu sesuai dengan fakta dan disampaikan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Konsistensi ini terlihat mulai dari tahap perencanaan, di mana RKAS disusun setiap awal tahun anggaran, hingga tahap pelaporan yang dilakukan secara berkala dan berulang mengikuti ketentuan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) BOS.

Informasi yang disampaikan kepada pihak internal seperti guru dan komite sekolah, maupun pihak eksternal seperti Dinas Pendidikan dan lembaga pengawas, selalu memiliki format dan isi yang seragam, sehingga tidak terjadi perbedaan data antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. SDN 25 Palu juga memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam RKAS sesuai dengan realisasi pelaksanaan di lapangan, serta konsisten dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diunggah melalui aplikasi ARKAS.

7. Kepatuhan pada Regulasi

SDN 25 Palu mengelola dana BOS dengan mematuhi seluruh peraturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Petunjuk Teknis

(Juknis) BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Kepatuhan ini mencakup seluruh tahapan pengelolaan dana, mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, hingga pelaporan. Dalam tahap perencanaan, penyusunan RKAS dilakukan berdasarkan format dan kategori belanja yang telah diatur dalam Juknis BOS, sehingga setiap alokasi anggaran memiliki dasar hukum yang jelas.

8. Evaluasi dan Perbaikan

SDN 25 Palu secara rutin melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana BOS sebagai bagian dari upaya memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dipimpin oleh kepala sekolah bersama tim BOS, dengan melibatkan bendahara, guru, serta perwakilan Komite Sekolah. Tujuan utama evaluasi adalah untuk menilai sejauh mana realisasi penggunaan dana sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun, serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Proses Alur Dana BOS di SDN 25 Palu:

Pertama, proses pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, guru, dan perwakilan komite sekolah menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah selama satu tahun anggaran. Perencanaan ini mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. RKAS disusun secara transparan dan partisipatif agar dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah.

Kedua, penyaluran dana BOS di SDN 25 Palu dilakukan langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Dana tersebut dicairkan dalam dua tahap selama satu tahun anggaran, yaitu Tahap I sebesar 50% yang disalurkan pada semester pertama (Januari hingga Juni), dan Tahap II sebesar 50% pada semester kedua (Juli hingga Desember). Dana ditransfer langsung ke rekening BOS milik SDN 25 Palu tanpa melalui pihak perantara, sehingga menjamin proses penyaluran yang lebih cepat, efisien, dan transparan.

Dalam hal ini, pelaksanaan dana BOS di SDN 25 Palu telah berjalan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang telah disusun secara rinci dan akuntabel. Seluruh proses penggunaan dana dilakukan berdasarkan perencanaan yang tertuang dalam RKAS serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Belanja modal digunakan untuk pengadaan atau penambahan aset tetap sekolah, seperti pembelian peralatan pembelajaran, perbaikan fasilitas kelas, atau pembangunan sarana penunjang pendidikan lainnya. Belanja barang dan jasa mencakup kebutuhan rutin operasional sekolah, seperti pembelian buku, alat tulis, bahan habis pakai, pembayaran listrik, air, langganan internet, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Sementara itu, belanja pegawai dialokasikan untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan non-PNS yang membantu proses belajar mengajar di sekolah. Semua pengeluaran tersebut dilakukan sesuai dengan RKAS yang telah disetujui, dan dicatat secara transparan oleh bendahara sekolah.

Keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekolah wajib menyusun dan mengunggah laporan realisasi penggunaan dana melalui aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) sebagai bentuk pelaporan resmi kepada pemerintah. Selain itu, apabila diperlukan, laporan juga disampaikan secara manual kepada Dinas Pendidikan Kota Palu. Dalam upaya menjaga transparansi publik, sekolah turut menyampaikan laporan keuangan kepada Komite Sekolah dan orang tua/wali murid, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui penggunaan dana secara jelas. Proses pengelolaan dan pelaporan dana BOS ini juga berada di bawah pengawasan berlapis, yang dilakukan oleh pengawas sekolah, Dinas Pendidikan, serta lembaga pemeriksa seperti Inspektorat Daerah, BPK, atau BPKP apabila dilakukan audit khusus. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan secara akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.

Kelima, evaluasi dan perbaikan terhadap penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu dilakukan secara berkala, terutama pada akhir tahun anggaran. Evaluasi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama tim BOS, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas penggunaan dana dalam mendukung kegiatan operasional dan pembelajaran di sekolah. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun dan memperbaiki Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk tahun anggaran berikutnya, sehingga alokasi dana dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan nyata sekolah. Evaluasi ini juga menjadi

bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS secara profesional dan bertanggung jawab.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keduanya menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan oleh pemerintah benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung operasional pendidikan. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendukung dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Berikut adalah kendala yang dihadapi di SDN 25 Palu Timur yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Zulmin, S.Pd. SD., M.Pd, dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Kendalanya itu adalah kegiatan sudah berjalan tetapi dana BOS belum ada. Kadang-kadang untuk pengembangan siswa, itu saja kendalanya.”⁹

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa salah satu tantangan yang cukup dominan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur adalah terjadinya keterlambatan pencairan dana. Dalam praktiknya, kegiatan-kegiatan sekolah yang telah direncanakan dan tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sering kali harus segera

⁹ Zulmin, Kepala Sekolah SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 21 Mei 2025.

dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahun ajaran, padahal dana BOS sebagai sumber utama pembiayaan belum tersedia atau belum dicairkan.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pihak sekolah, terutama ketika kegiatan yang dimaksud berkaitan dengan pengembangan peserta didik seperti kegiatan pembinaan karakter, ekstrakurikuler, atau perlombaan antarkelas yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan-kegiatan tersebut idealnya didukung oleh anggaran yang memadai, tetapi karena keterlambatan dana, pihak sekolah dituntut untuk mencari solusi sementara atau bahkan menunda pelaksanaannya. Hal ini tentu dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.

Lebih lanjut, dampak dari keterlambatan pencairan dana BOS ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis kegiatan, tetapi juga dapat memengaruhi aspek administrasi keuangan dan pelaporan. Sekolah harus berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan, karena kegiatan yang telah berjalan sebelum dana dicairkan harus tetap dipertanggungjawabkan secara akurat dan sesuai prosedur. Kesalahan dalam mencatat atau menyusun laporan dapat berimplikasi pada temuan audit dan menimbulkan masalah administratif yang lebih besar.

Kepala sekolah juga menekankan bahwa pengembangan siswa merupakan salah satu program prioritas di sekolah yang sangat membutuhkan pendanaan yang konsisten. Namun ketika dana belum tersedia sementara kegiatan harus dilaksanakan, maka hal ini menjadi dilema tersendiri bagi pengelola sekolah. Oleh karena itu, beliau berharap adanya penyesuaian dalam sistem pencairan dana BOS agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah di lapangan.

Dengan demikian, kendala utama yang dihadapi SDN 25 Palu Timur dalam pengelolaan dana BOS adalah kurangnya sinkronisasi antara waktu pencairan dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kendala ini menunjukkan pentingnya dukungan sistem yang lebih responsif dari pihak terkait, serta perlunya manajemen sekolah mengembangkan strategi perencanaan yang adaptif dan efisien agar program-program pendidikan tetap berjalan dengan optimal meskipun menghadapi keterbatasan anggaran sementara.

Selain kendala yang dirasakan oleh kepala sekolah, bendahara sekolah juga menghadapi tantangan tersendiri, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan dana BOS. Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan bendahara SDN 25 Palu Timur:

“Kalau kesulitan, tentu ada, terutama terkait dengan dokumentasi. Karena saya juga seorang guru, dan tugas utama saya bukan sebagai bendahara, kadang ada dokumen yang terlewat atau kurang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, saya harus mereview kembali setiap berkas, mulai dari tanggal, jenis pengeluaran, hingga bukti pendukungnya. Hal-hal kecil seperti ini sangat penting karena akan menjadi fokus dalam pemeriksaan, dan biasanya justru yang tampak sepele itu yang diperiksa secara detail.”¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi ganda bendahara sebagai guru dan pengelola keuangan sekolah menjadi salah satu penyebab utama kurangnya ketertiban dalam dokumentasi. Banyak kegiatan keuangan yang berlangsung secara bersamaan dengan aktivitas pembelajaran, sehingga pencatatan transaksi dan pengumpulan bukti pembelanjaan sering kali dilakukan dalam waktu yang terbatas atau bahkan tertunda. Akibatnya, terdapat risiko dokumen tidak

¹⁰ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Penulis, 11 Juni 2025.

tersimpan dengan baik, terjadi ketidaksesuaian antara bukti dan laporan, atau rincian transaksi tidak lengkap.

Dalam konteks pelaporan dana BOS, setiap elemen dokumentasi sangat penting untuk menjamin akuntabilitas dan memudahkan proses audit. Ketidakcermatan dalam mencatat tanggal, jenis pengeluaran, atau kehilangan bukti transaksi dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan realisasi dan kondisi faktual di lapangan. Hal ini tentu menjadi catatan penting dalam proses pengawasan dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan maupun lembaga pengaudit eksternal.

Kondisi ini menegaskan bahwa proses dokumentasi tidak dapat dipandang sebelah mata. Meski terlihat sederhana, tetapi dokumentasi merupakan bagian vital dari transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Tanpa dokumentasi yang lengkap dan tertib, maka pelaporan keuangan tidak akan valid dan berisiko menimbulkan masalah hukum atau administratif di kemudian hari.

Solusi yang relevan untuk mengatasi kendala ini adalah dengan memberikan pelatihan teknis khusus bagi bendahara sekolah terkait manajemen dokumentasi keuangan, memanfaatkan aplikasi digital untuk pencatatan transaksi secara real-time, serta mendorong adanya pembagian tugas atau pendampingan dari tim administrasi agar beban kerja bendahara dapat terbagi dengan lebih efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 25 Palu Timur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua faktor penghambat utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu:

1. Keterlambatan Pencairan Dana BOS

Kepala sekolah menyampaikan bahwa salah satu faktor penghambat signifikan dalam pelaksanaan program sekolah adalah terjadinya keterlambatan pencairan dana BOS, sementara kegiatan yang telah direncanakan dalam RKAS harus segera dijalankan sesuai kalender pendidikan. Hal ini terutama berdampak pada kegiatan pengembangan peserta didik seperti pembinaan karakter, ekstrakurikuler, hingga perlombaan antarkelas. Ketidaksesuaian antara waktu pencairan dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan menimbulkan dilema bagi pihak sekolah, yang harus tetap memastikan program berjalan meskipun dana belum tersedia. Kondisi ini tidak hanya menghambat pelaksanaan kegiatan, tetapi juga menambah beban administratif karena sekolah tetap harus mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah terlaksana secara formal dan sesuai ketentuan pelaporan keuangan.

2. Kurangnya Ketertiban Dokumentasi karena Peran Ganda Bendahara

Faktor penghambat selanjutnya berasal dari sisi internal, yakni kurangnya ketertiban dalam dokumentasi administrasi keuangan yang disebabkan oleh peran ganda bendahara sekolah yang juga merangkap sebagai guru. Fokus dan waktu yang terbagi menyebabkan dokumentasi seperti pencatatan transaksi, pengumpulan bukti pembelanjaan, serta pencocokan tanggal dan jenis pengeluaran tidak selalu dilakukan secara optimal. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan. Dalam proses audit dan pemeriksaan,

kesalahan dokumentasi sekecil apa pun dapat berdampak serius terhadap kredibilitas laporan sekolah. Oleh karena itu, faktor ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas bendahara, pelatihan teknis, serta penggunaan sistem digital untuk menunjang efektivitas dan akurasi dokumentasi keuangan.

Kedua faktor penghambat tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan yang baik, melainkan juga memerlukan dukungan sistemik dan struktural yang memadai. Sinkronisasi antara waktu pencairan dan kebutuhan operasional sekolah sangat dibutuhkan agar kegiatan berjalan tepat waktu. Di sisi lain, kemampuan teknis dan manajerial bendahara juga perlu ditingkatkan agar aspek administrasi berjalan tertib dan sesuai standar akuntabilitas. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan efektif akan semakin kuat dan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di lingkungan SDN 25 Palu Timur.

Faktor penghambat lainnya juga dijelaskan oleh salah satu guru SDN 25 Palu. Beliau mengatakan:

“Kendala biasanya muncul karena bendahara juga merupakan guru kelas, sehingga harus menyelesaikan tugas mengajar terlebih dahulu sebelum melayani kebutuhan lainnya. Hal ini membuat proses kadang sedikit lambat, tetapi tidak menjadi masalah besar.”¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Palu adalah rangkapnya tugas bendahara yang juga berperan sebagai guru kelas. Hal ini menyebabkan

¹¹ Safruddin R. Lamadang, Guru SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 3 Juni 2025.

keterlambatan dalam pelayanan kebutuhan administrasi, meskipun tidak menimbulkan masalah besar karena tugas pokok sebagai pendidik tetap menjadi prioritas.

Selain faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung yang memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah, Zulmin, S.Pd. SD. M.Pd, dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis. Beliau menyatakan bahwa salah satu aspek positif yang mendukung kelancaran pelaporan dan pelaksanaan program sekolah adalah adanya respon cepat dari pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal penyusunan laporan dan pengelolaan dokumen administrasi. Berikut kutipan pernyataan beliau:

“Hasil ini dikasih cepat untuk membuat laporan, dampaknya untuk dana BOS terencana bagus untuk sekolah karena terlaksananya program.”¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan dalam proses administrasi dan pelaporan menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam mewujudkan pengelolaan dana BOS yang terencana dengan baik. Ketika laporan dapat disiapkan dengan cepat dan tepat, maka hal ini berdampak langsung pada efisiensi penggunaan dana, keterpaduan pelaksanaan program, dan kecepatan pencairan dana untuk tahap berikutnya. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan sekolah dapat berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan berarti.

Faktor pendukung lainnya juga disampaikan oleh salah satu guru di SDN 25 Palu Timur. Guru tersebut menjelaskan bahwa sistem pembagian tugas yang

¹² Zulmin, Kepala Sekolah SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 21 Mei 2025.

diterapkan di sekolah turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Salah satu bentuk nyata dari sistem tersebut adalah penunjukan guru sebagai bendahara BOS. Berikut kutipan pernyataannya:

“Bendahara BOS dipegang oleh guru, jadi guru-guru lainnya tidak dibebani tanggung jawab sebagai bendahara. Semua urusan administrasi sepenuhnya ditangani oleh bendahara yang sudah ditunjuk.”¹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembagian tugas yang jelas dan terstruktur menjadi faktor pendukung penting dalam pengelolaan dana BOS. Dengan menunjuk satu orang guru secara khusus untuk menangani tugas sebagai bendahara, maka pengelolaan administrasi keuangan menjadi lebih fokus dan tertata. Guru-guru lain pun dapat berkonsentrasi pada tugas utama mereka dalam proses pembelajaran tanpa harus terbebani oleh urusan administratif BOS.

Selain itu, penunjukan bendahara dari kalangan guru yang memahami kondisi sekolah juga mempermudah koordinasi dan komunikasi antar pihak. Hal ini menciptakan suasana kerja yang kolaboratif serta meminimalisir kesalahpahaman dalam pelaksanaan program yang didanai oleh BOS.

Dengan kata lain, kejelasan peran dan tanggung jawab menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Ketika tugas dikelola oleh pihak yang kompeten dan memahami sistem sekolah, maka proses pelaporan, pencatatan, dan penggunaan dana dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. Praktik ini mencerminkan manajemen sekolah yang profesional dan responsif terhadap tuntutan tata kelola keuangan yang baik.

¹³ Safruddin R. Lamadang, Guru SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata, Loroang Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 2 Juni 2025.

Secara umum, terdapat beberapa faktor pendukung yang berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur. Pertama, adanya komitmen dari kepala sekolah untuk menyusun perencanaan secara terbuka dan melibatkan seluruh pihak, termasuk guru, dalam proses penyusunan dan evaluasi RKAS. Kedua, respon cepat dalam proses pelaporan dan administrasi keuangan turut mendorong kelancaran pelaksanaan program-program sekolah serta mempermudah proses pencairan dana tahap selanjutnya.

Pembagian tugas yang jelas antara guru dan bendahara juga menjadi pendukung signifikan. Penunjukan bendahara dari kalangan guru yang secara khusus menangani urusan keuangan memungkinkan efisiensi kerja dan pengelolaan dokumen yang lebih tertib, sekaligus mencegah beban ganda pada guru lain. Komunikasi yang terbangun antara kepala sekolah, bendahara, dan tenaga pendidik juga menciptakan sinergi yang baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan anggaran.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara kepemimpinan yang partisipatif, sistem administrasi yang responsif, serta struktur organisasi sekolah yang mendukung efisiensi dan tanggung jawab bersama.

D. Akuntabilitas dalam Penggunaan Dana BOS di SDN 25 Palu

Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh individu atau lembaga kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan. Dalam konteks

pengelolaan dana, akuntabilitas berarti kemampuan untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, jujur, tepat sasaran, dan sesuai aturan yang berlaku.

Di SDN 25 Palu Timur, akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sekolah, hasil analisis Rapor Pendidikan, serta melibatkan guru dan pihak terkait dalam proses perencanaan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga menjamin bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada mutu pendidikan.

Proses pertanggungjawaban juga dilakukan secara formal melalui pelaporan keuangan yang rutin dan sesuai jadwal. Bendahara sekolah bertanggung jawab untuk mendokumentasikan setiap transaksi secara lengkap, mulai dari bukti pengeluaran, rincian belanja, hingga pelaporan ke Dinas Pendidikan. Kepala sekolah juga turut mengawasi dan memverifikasi agar seluruh laporan disusun dengan benar, akurat, dan siap untuk diaudit kapan saja oleh pihak yang berwenang.

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Sekolah mengenai mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya:

“Artinya, pelaporan penggunaan dana BOS di sekolah ini telah dilaksanakan sesuai dengan sistematika dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Bendahara sekolah juga sangat tertib dalam menyusun laporan; semua dokumen disusun secara rapi dan terjadwal dengan baik.

Selain itu, pelaporan selalu mengikuti proses asistensi dari pihak dinas. Jika hasil asistensi dinilai sudah sesuai dan lengkap, maka laporan tersebut langsung ditandatangani tanpa perlu dikembalikan atau direvisi. Selama ini, laporan dana BOS dari sekolah kami tidak pernah mengalami pengembalian karena kekeliruan, selalu langsung diterima dan disahkan.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Kepala sekolah memberikan penjelasan bahwa seluruh proses pelaporan telah mengikuti alur prosedural yang ketat, mulai dari pencatatan, dokumentasi, hingga asistensi dan verifikasi oleh pihak dinas terkait.

Bendahara sekolah dinilai memiliki tingkat kedisiplinan dan ketelitian yang tinggi dalam menyusun laporan keuangan. Setiap dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS seperti bukti pembelanjaan, nota, dan rincian pengeluaran disusun secara sistematis, rapi, dan sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, pelaporan dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan waktu asistensi yang dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan.

Salah satu indikator penting yang menunjukkan tingginya akuntabilitas pelaporan dana BOS di SDN 25 Palu Timur adalah tidak adanya pengembalian laporan dari Dinas Pendidikan untuk direvisi. Artinya, laporan yang diajukan selalu dapat diterima tanpa koreksi karena telah memenuhi standar administrasi dan kelengkapan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana BOS

¹⁴ Zulmin, Kepala Sekolah SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 21 Mei 2025.

di sekolah tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara substantif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun bendahara, memiliki komitmen tinggi terhadap tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga menjaga integritas dan kepercayaan publik melalui pelaporan yang akurat dan transparan. Dengan demikian, akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung efektivitas program-program pendidikan dan peningkatan mutu layanan sekolah secara keseluruhan.

Selain pertanggungjawaban, prosedur pencairan dan penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur juga dijelaskan secara rinci oleh bendahara sekolah sebagai berikut:

“Awalnya, proses penggunaan dana BOS dimulai dengan mengidentifikasi masukan dari guru-guru terkait kebutuhan sekolah. Masukan tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan mana yang menjadi kebutuhan mendesak dan mana yang dapat ditunda. Setelah itu, hasil analisis tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan awal, dan kami mulai menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan yang telah diprioritaskan. Dalam penyusunannya, kami berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku agar seluruh rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah anggaran disusun, kami melakukan verifikasi dan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Kami juga mendiskusikan rencana tersebut secara terbuka dengan melibatkan orang tua siswa, komite sekolah, serta dewan guru, agar ada partisipasi dari berbagai unsur yang ada di lingkungan sekolah. Untuk proses pencairan dana, kami menunggu evaluasi dan pembinaan dari pihak Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Dinas akan menilai apakah perencanaan yang kami ajukan sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Jika telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas, maka kami akan menerima surat rekomendasi sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana BOS. Proses pencairan ini dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan

oleh dinas, dan seluruh langkahnya harus dijalankan secara tertib dan transparan.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pencairan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mengacu pada ketentuan dan pedoman teknis (juknis) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme yang terstruktur dan sistematis yang dijalankan secara konsisten oleh pihak sekolah, khususnya oleh bendahara sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan keuangan.

Menurut bendahara Sekolah SDN 25 Palu, apabila pencairan dana BOS mengalami keterlambatan, pihak sekolah biasanya menggunakan dana pribadi bendahara sekolah untuk menutupi kebutuhan sementara. Hal ini dianggap sebagai risiko yang telah dipahami oleh bendahara. Selain itu, guru-guru tidak pernah dibebankan biaya tambahan karena seluruh pengeluaran ditanggung oleh bendahara dengan dana pribadinya. Bendahara juga menegaskan bahwa penggunaan dana pribadi ini tidak pernah disalahgunakan, melainkan murni untuk kelancaran operasional sekolah.¹⁶

Beliau juga menegaskan bahwa bendahara memiliki peran ganda karena di tingkat SD saat ini tidak lagi terdapat tenaga tata usaha. Kepercayaan kepala sekolah terhadap bendahara menjadi faktor utama, mengingat jarang ada pihak

¹⁵ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 11 Mei 2025.

¹⁶ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 11 Mei 2025.

yang bersedia mengelola dana BOS, kecuali di tingkat SMP. Selain itu, hal ini juga mencerminkan adanya kenyamanan dan hubungan saling percaya antara guru dan bendahara, meskipun terdapat perbedaan latar belakang (gap) di antara mereka.¹⁷

Pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu menunjukkan bahwa bendahara sekolah memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab. Ketika terjadi keterlambatan pencairan dana BOS, bendahara menggunakan dana pribadi untuk memastikan kelancaran operasional sekolah tanpa membebani guru. Tindakan ini dilakukan atas dasar kepercayaan dari kepala sekolah dan komitmen bendahara, meskipun di tingkat SD tidak ada tenaga tata usaha. Selain itu, hubungan kerja yang didasari rasa saling percaya antara bendahara dan guru, meskipun terdapat perbedaan latar belakang, mencerminkan tingginya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS.

Tahapan pertama dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan yang bersumber dari usulan para guru sebagai pihak yang paling mengetahui kebutuhan pembelajaran di kelas. Masukan ini kemudian dianalisis untuk menentukan skala prioritas, yakni membedakan antara kebutuhan yang mendesak dan yang masih dapat ditunda. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dana BOS dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Setelah kebutuhan diklasifikasikan, sekolah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada juknis penggunaan dana BOS. Hal ini dilakukan agar setiap kegiatan yang direncanakan tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan yang

¹⁷ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 11 Mei 2025.

berlaku. Penyusunan ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses diskusi dan koordinasi yang melibatkan pihak internal sekolah seperti dewan guru, serta pihak eksternal seperti komite sekolah dan orang tua siswa. Hal ini mencerminkan adanya semangat kolaboratif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait anggaran.

Proses pencairan dana dilakukan setelah pihak sekolah menjalani proses verifikasi dan asistensi dari Dinas Pendidikan. Dalam tahap ini, dinas akan melakukan pembinaan terhadap sekolah, mengevaluasi kesesuaian antara rencana kegiatan yang diajukan dengan ketentuan juknis, dan memastikan bahwa dokumen administrasi telah lengkap dan tersusun rapi. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dinyatakan layak, maka pihak dinas akan mengeluarkan surat rekomendasi sebagai dasar bagi sekolah untuk melakukan proses pencairan dana secara resmi.

Dengan adanya sistem yang tertib dan keterlibatan banyak pihak, pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menunjukkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab kolektif dalam membangun tata kelola keuangan sekolah yang sehat. Hal ini pada akhirnya berkontribusi besar terhadap efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan pencapaian mutu layanan pembelajaran yang lebih baik bagi seluruh peserta didik.

Adapun evaluasi yang dilakukan dalam pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur dijelaskan melalui hasil wawancara berikut:

“Ya, kalau evaluasi pasti dilakukan di akhir. Biasanya setelah pembukuan di akhir Desember, sebelum kita menyusun penganggaran untuk tahun

berikutnya. Tentunya, kita mengevaluasi kegiatan mana yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang masih perlu ditambah, terutama terkait sarana dan prasarana yang sudah dianggarkan. Kita juga menilai kegiatan mana yang tidak perlu dilanjutkan serta mana yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya.”¹⁸

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa proses evaluasi terhadap penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan sekolah yang dilaksanakan secara berkala, khususnya pada akhir tahun anggaran. Evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pembukuan selesai, sebagai langkah awal dalam menyusun anggaran baru untuk tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki kesadaran dan komitmen dalam memastikan bahwa penggunaan dana BOS tidak hanya dijalankan, tetapi juga dikaji efektivitas dan dampaknya.

Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, efektivitas program yang dijalankan, hingga efisiensi penggunaan anggaran untuk sarana dan prasarana. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan dengan baik akan menjadi acuan untuk dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan kegiatan yang kurang berdampak atau tidak sesuai prioritas akan direvisi atau bahkan dihentikan. Penilaian juga dilakukan terhadap anggaran yang tidak terlalu mendesak agar bisa dialihkan ke program yang lebih urgent dan relevan dengan kebutuhan sekolah.

Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola dana BOS yang responsif,

¹⁸ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 11 Mei 2025.

akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh dan melibatkan berbagai unsur di sekolah, pengambilan keputusan dalam penganggaran selanjutnya menjadi lebih tepat sasaran dan terukur. Hal ini juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, karena setiap kegiatan dievaluasi secara terbuka dan berdasarkan pertimbangan rasional serta kebutuhan nyata di lapangan.

Proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah bukan hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS agar lebih efektif, efisien, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di SDN 25 Palu Timur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip akuntabilitas yang diterapkan di SDN 25 Palu bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah dari dana BOS digunakan sesuai aturan, memenuhi kebutuhan sekolah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif. Proses akuntabilitas ini dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi, dengan mengedepankan keterbukaan dan dokumentasi yang lengkap.¹⁹

¹⁹ Sulfiati F, Andi Samsu Alam dan Andi Lukman Irwan, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai, 3.2. (2010): 113-122.

1. Akuntabilitas Internal

Di dalam lingkungan SDN 25 Palu, akuntabilitas internal diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban berlapis. Bendahara sekolah secara rutin menyusun catatan transaksi keuangan harian, yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh kepala sekolah. Setiap pengeluaran wajib disertai bukti fisik berupa nota, faktur, atau kuitansi resmi. Selain itu, rapat internal dengan guru dan komite sekolah dilakukan untuk membahas realisasi anggaran dan memastikan kesesuaian dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

SDN 25 Palu secara rutin melaporkan penggunaan dana BOS kepada pihak luar, termasuk Dinas Pendidikan Kota Palu, Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dibutuhkan. Setiap laporan keuangan telah melalui proses verifikasi dan asistensi dari Dinas Pendidikan sebelum disahkan. Keberhasilan akuntabilitas eksternal terlihat dari catatan bahwa laporan BOS SDN 25 Palu selalu diterima tanpa pengembalian atau koreksi yang berarti, sehingga membuktikan kepatuhan terhadap aturan dan standar pelaporan yang berlaku.²⁰

Dalam aspek pengawasan, Inspektorat tetap melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS. Audit ini dilakukan tidak hanya oleh bendahara sekolah, tetapi juga oleh pihak Inspektorat, BPKAD, dan BPK. Kepala sekolah menjelaskan bahwa peran Inspektorat bukan sekadar memeriksa ketika terjadi

²⁰ Rommy, Bendahara SDN 25 Palu, Jl. Otto Iskandardinata Lorong Lestari No. 7, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, wawancara oleh penulis di SDN 25 Palu, 11 Mei 2025.

penyelewengan, tetapi juga memberikan pembinaan. Apabila ditemukan permasalahan, Inspektorat akan membimbing pihak sekolah untuk mencari solusi, misalnya mengembalikan dana tersebut atau menggunakannya untuk pembelian barang sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dana BOS di SDN 25 Palu tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, yang menekankan akuntabilitas dan komitmen terhadap pengelolaan dana secara benar.

3. Perencanaan

Proses perencanaan di SDN 25 Palu dimulai dengan penjaringan aspirasi dan usulan kebutuhan dari guru, staf, dan perwakilan orang tua melalui rapat komite sekolah. Usulan ini kemudian dianalisis untuk menentukan skala prioritas sesuai dengan ketentuan Juknis BOS. Penyusunan RKAS melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Hasil perencanaan ini didokumentasikan secara tertulis dan disimpan sebagai arsip sekolah.

4. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan asistensi dengan Dinas Pendidikan. Dana yang sudah dicairkan digunakan sesuai pos anggaran yang telah disepakati di RKAS. Setiap pembelanjaan dicatat secara rinci, dilengkapi bukti transaksi yang sah, dan disimpan dalam arsip keuangan sekolah. Pihak sekolah juga mengutamakan transparansi dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada guru dan komite sekolah secara berkala.

Pada tahun 2024, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu dicairkan dalam dua tahap guna mendukung kelancaran kegiatan operasional dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tahap pertama pencairan dilakukan pada bulan Juni dengan jumlah sebesar Rp165.077.866, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah seperti pengadaan sarana dan prasarana, pembelian alat tulis dan bahan pembelajaran, serta pembayaran honorarium guru honorer. Tahap kedua pencairan dilakukan pada bulan Desember sebesar Rp186.822.134, yang dialokasikan untuk melanjutkan pemenuhan kebutuhan operasional, perawatan fasilitas sekolah, serta pelaksanaan program-program pembelajaran tambahan yang menunjang kualitas pendidikan siswa. Adapun rincian penggunaan dana BOS tersebut dapat dilihat pada gambar berikut, yang menggambarkan alokasi setiap pos pengeluaran secara rinci.

PENERIMAAN				PENGELUARAN BELANJA			
No Urut	No Kode	Uraian	Jumlah	No Urut	No Kode	Uraian	Jumlah
I	1	Sisa Tahap Sebelumnya	Rp1.175.000	I	1	Program Sekolah	
					1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	0
II	2	Pendapatan Rutin			1.2	Pengembangan Standar Isi	450.000
	2.1	Gaji PNS			1.3	Pengembangan Standar Proses	16.769.075
	2.2	Gaji Pegawai Tidak tetap			1.4	Pengembangan Pendidik dan tenaga Kependidikan	6.435.000
	2.3	Belanja Barang dan Jasa			1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	28.695.500
	2.4	Belanja Pemeliharaan			1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	49.633.416
	2.5	Belanja Lain-Lain			1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan	29.573.725
					1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	26.814.150
III	3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					
	3.1	Bos Pusat	175.950.000	2	2	Belanja Lainnya	
	3.2	Bos Provinsi			2.1	Belanja Modal	6.707.000
	3.3	Bos Kabupaten / Kota					
IV	4	Bantuan					
	4.1	Dana Dekonsentrasi					
	4.2	Dana Tugas Pembantuan					
	4.3	Dana Alokasi Khusus					
	4.4	Lain-Lain (Bantuan Luar negeri/Hibah)					
V	5	Sumber Pendapatan Lainnya					
	5.1						
	5.2						
Jumlah Penerimaan			177.125.000	Jumlah Pengeluaran			165.077.866

Gambar 4.2 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bulan Juni
(Sumber: Arsip SDN 25 Palu)

PENERIMAAN				PENGELUARAN BELANJA			
No Urut	No Kode	Uraian	Jumlah	No Urut	No Kode	Uraian	Jumlah
I	1	Sisa Tahap Sebelumnya	Rp12.047.134	I	1	Program Sekolah	
			Rp1.175.000		1.1	Pengembangan Kompetensi Lulusan	0
II	2	Pendapatan Rutin			1.2	Pengembangan Standar Isi	3.590.000
	2.1	Gaji PNS			1.3	Pengembangan Standar Proses	19.184.350
	2.2	Gaji Pegawai Tidak tetap			1.4	Pengembangan Pendidik dan tenaga Kependidikan	10.392.500
	2.3	Belanja Barang dan Jasa			1.5	Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	40.264.500
	2.4	Belanja Pemeliharaan			1.6	Pengembangan Standar Pengelolaan	40.289.109
	2.5	Belanja Lain-Lain			1.7	Pengembangan Standar Pembiayaan	24.710.575
					1.8	Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	32.991.100
III	3	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					
	3.1	Bos Pusat	175.950.000		2	Belanja Lainnya	
	3.2	Bos Provinsi			2.1	Belanja Modal	15.400.000
	3.3	Bos Kabupaten / Kota					
IV	4	Bantuan					
	4.1	Dana Dekonsentrasi					
	4.2	Dana Tugas Pembantuan					
	4.3	Dana Alokasi Khusus					
	4.4	Lain-Lain (Bantuan Luar negeri/Hibah)					
V	5	Sumber Pendapatan Lainnya					
	5.1						
	5.2						
Jumlah Penerimaan			186.822.134	Jumlah Pengeluaran			186.822.134

Gambar 4.3 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bulan Juni
(Sumber: Arsip SDN 25 Palu)

Berdasarkan pencairan pada kedua tahap tersebut, dapat disimpulkan bahwa total dana BOS yang diterima SDN 25 Palu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp351.900.000, yang secara keseluruhan dimanfaatkan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan optimal dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bendahara SDN 25 Palu menyusun laporan realisasi anggaran setiap triwulan, lengkap dengan bukti penerimaan, pengeluaran, dan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan tersebut diverifikasi oleh kepala sekolah sebelum disampaikan ke Dinas Pendidikan. Dokumen laporan disusun sesuai format yang berlaku agar mudah dibaca dan dipahami oleh pihak yang memeriksa. Keberhasilan SDN 25 Palu terlihat dari konsistensi laporan yang selalu diterima tanpa catatan revisi dari instansi terkait.

6. Evaluasi

Evaluasi pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu dilakukan setiap akhir tahun anggaran dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Tujuannya untuk menilai efektivitas penggunaan dana, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan perbaikan untuk periode anggaran berikutnya. Hasil evaluasi juga menjadi bahan dalam rapat komite agar seluruh pihak memahami capaian dan rencana ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “*Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 25 Palu Timur Kota Palu*”. Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang mendalam mengenai praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, penulis telah melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan salah satu guru di SDN 25 Palu Timur. Hasil dari wawancara tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perencanaan, pencairan, penggunaan, pelaporan, hingga evaluasi dana BOS di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur telah mencerminkan prinsip transparansi yang baik. Hal ini dibuktikan melalui keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), di antaranya guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta orang tua siswa. Penyusunan RKAS didasarkan pada kebutuhan riil sekolah yang diidentifikasi bersama, sehingga memastikan bahwa alokasi dana benar-benar difokuskan pada program-program prioritas. Informasi mengenai penggunaan dana juga disampaikan dalam forum rapat dan didokumentasikan secara terbuka, yang menunjukkan bahwa sekolah

berupaya menjunjung nilai-nilai transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, yang menyebabkan kegiatan dalam RKAS tetap harus dilaksanakan meski dana belum tersedia. Hal ini mendorong sekolah mencari solusi sementara yang dapat mengganggu ketertiban administrasi dan pelaporan. Selain itu, bendahara sekolah yang juga merangkap sebagai guru menghadapi beban ganda, sehingga pencatatan dan dokumentasi keuangan kerap kurang optimal, berisiko menimbulkan kesalahan atau keterlambatan laporan. Namun demikian, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Di antaranya adalah tertibnya dokumentasi keuangan oleh bendahara, dengan pencatatan yang rapi, arsip bukti pengeluaran yang lengkap, dan penyusunan laporan secara sistematis dan tepat waktu. Laporan keuangan yang tidak pernah dikembalikan atau direvisi oleh Dinas Pendidikan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan dana. Selain itu, pembinaan, koordinasi, dan asistensi rutin dari Dinas Pendidikan juga membantu memastikan pelaporan dilakukan secara kredibel dan sesuai ketentuan.
3. Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di SDN 25 Palu Timur diwujudkan melalui sistem pelaporan yang tertib, terstruktur,

dan sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Bendahara secara konsisten menyusun dokumen keuangan secara lengkap dan tepat waktu, sementara kepala sekolah melakukan pengawasan dan verifikasi sebelum laporan diserahkan. Pelaporan ini selalu melalui proses asistensi dan apabila telah sesuai, langsung disetujui tanpa revisi. Fakta bahwa laporan selalu diterima tanpa koreksi menunjukkan tata kelola keuangan yang profesional dan bertanggung jawab. Prosedur pencairan dan penggunaan dana BOS dilakukan secara transparan dan sistematis. Dimulai dari identifikasi kebutuhan oleh guru, analisis prioritas, penyusunan anggaran berdasarkan juknis, hingga proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan. Proses ini melibatkan partisipasi komite sekolah dan orang tua sebagai bentuk akuntabilitas kolektif. Setelah semua persyaratan dipenuhi, sekolah menerima surat rekomendasi sebagai dasar pencairan dana. Evaluasi penggunaan dana BOS dilakukan setiap akhir tahun anggaran, setelah pembukuan bulan Desember. Evaluasi ini mencakup efektivitas program, penggunaan dana untuk sarana prasarana, dan identifikasi kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dihentikan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya agar penggunaan dana lebih efisien dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN 25 Palu Timur.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur telah menunjukkan praktik transparansi dan akuntabilitas yang

cukup baik, terutama dalam aspek pelaporan, dokumentasi, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan evaluasi. Temuan ini mengimplikasikan bahwa tata kelola keuangan sekolah yang akuntabel sangat mungkin diterapkan di tingkat satuan pendidikan dasar apabila didukung oleh sistem pelaporan yang jelas, sumber daya manusia yang disiplin, serta koordinasi yang baik dengan dinas pendidikan. Keberhasilan SDN 25 Palu Timur dapat dijadikan contoh praktik baik bagi sekolah-sekolah lain dalam mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan profesional.

1. Untuk Pemerintah/Dinas Pendidikan:

- a. Disarankan agar proses pencairan dana BOS dilakukan secara lebih tepat waktu agar tidak menghambat pelaksanaan program-program sekolah yang telah direncanakan dalam RKAS.
- b. Perlu memperkuat program pelatihan dan pendampingan teknis bagi bendahara sekolah, khususnya dalam hal dokumentasi dan pelaporan keuangan digital, guna meminimalisir kesalahan administrasi akibat beban kerja ganda.

2. Untuk Sekolah (Kepala Sekolah dan Bendahara):

- a. Perlu mempertimbangkan pembagian tugas administratif secara lebih proporsional agar bendahara tidak terbebani dengan tugas ganda, sehingga pencatatan dan pelaporan keuangan dapat lebih optimal.
- b. Disarankan untuk terus mempertahankan praktik keterbukaan dalam penyusunan anggaran dan pelibatan semua pihak, termasuk guru dan komite sekolah, sebagai bentuk transparansi yang berkelanjutan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya:

- a. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan praktik pengelolaan dana BOS di beberapa sekolah dasar negeri lainnya di wilayah berbeda guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- b. Dapat pula ditambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur seberapa besar pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas penggunaan dana BOS dalam peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manab. *Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2016, 4.
- Amin, N. W., Indriani, E., & Mariadi, Y. "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kecamatan Mataram tahun 2021." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2.1 (2022): 166-174.
- Angkouw, Fini Agustina Dorci, Daisy SM Engka, and Ita Pingkan F. Rorong. "Analisis Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Tontalet Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23.1 (2023): 13-24.
- Arwani, Agus, and Unggul Priyadi. "Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* 2.2 (2024): 23-37.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2009, 90-91.
- Delfa Indah Sari. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. (Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Dwi Oktavia, Syunu Trihantoyo, Windasari. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Tambaksari I." *Journal on Education* Mei-Agustus 2023: 16371-16378.
- Eka Puteri Trisita Sine, Maria E.D. Tunti, Sarinah Joyce Margaret Rafael. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah di Kota Kupang)." *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas* 9.1 (2021): 1-8.
- Elivira Amelia Kaligis, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 12.2 (2021): 207-224.
- Fajar Panuluh, Garda. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun." (2020).
- Firmansyah Hidayat, and Ismail Tolla. "Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* 3.1 (2022): 66-74.
- Hermawan Mualifu, Ahmad Guspul, and Mualifu Hermawan. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola

- Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 1.1 (2019): 49-59.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Ed. 1, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 66.
- Hidayat, Firmansyah, and Ismail Tolla. "Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurnal Administrasi, Kebijakan, Dan Kepemimpinan Pendidikan* 3.1 (2022): 66-74.
- Kaligis, Elivira Amelia, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 12.2 (2021): 207-224.
- Kaswita, Elya. *Implementasi Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.
- Lailia, Umi Nur. *Analisis prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana bantuan operasional Sekolah di SMP Negeri 3 Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014, 28.
- Mifta Indah Wahinun. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Mi Roudlotus Salam*. Diss. Universitas Islam Majapahit Mojokerto, 2019.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2008, 152.
- Mualifu, Mualifu, Ahmad Guspul, and Hermawan Hermawan. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)." *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)* 1.1 (2019): 49-59.
- Nasution, *Metode Research*. Ed. 1, Cet. XIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2012, 144-145.
- Nico Adrianto. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hal. 21-22.
- Nurrochman, Taufik, et al. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2023): 60-70.

- Octofrezi, Permana. "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I)." *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2.2 (2020): 13-38.
- Pane, Siti Hawa Rahma Sari. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Mis Perguruan Ubudiyah Medan. Diss. State Islamic University of North Sumatera, 2023.
- Rachman, Dani, Djodi Setiawan, and Reza Maftuh Taufik Nugraha. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMA Sasama." *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 13.03 (2022): 73-86.
- Ridha Albiy, Yahya. "Efektifitas Penggunaan Dana BOS di MTs Swasta pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmu Pendidikan* Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021: 2277-2286.
- Sari, Delfa Indah. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (Studi Kasus Pada Satu Sekolah Dasar Negeri di Binjai Utara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Setyanto, Roberthus, Siti Ridloah, and A. Suryasai. "Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang." *JMM UNRAM-Master of Management Journal* 11.3 (2022).
- Slamet Suyanto. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2005, 5.
- Suryadi, Nurafni I., Ventje Ilat, and Lidia M. Mawikere. "Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11.1 (2023): 855-865.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, 45.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Cet. II; Depok: Rajawali Pers, 2018, 91.
- Sudyartini, Zaenal Wafa. "Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Yogyakarta." *Journal on Education* Maret-April 2024: 17807-17816.
- Sulfiati F, Andi Samsu Alam, Andi Lukman Irwan. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai."
- Sirait, Jannes Eduard, and Leorince Leorince. "Institusi Pendidikan Kristen Sebagai Pilar Kemerdekaan Pendidikan di Indonesia." *Diegesis: Jurnal Teologi* 9.2 (2024): 207-231.

- Siti Hawa Rahma Sari. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIS Perguruan Ubudiyah Medan." (2023).
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. "Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan." (2023).
- Temalagi, Selva, and Revi W. Silooy. "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru." *Accounting Research Unit (ARU Journal)* 3.1 (2022): 39-53.
- Tandililing, Juliana. "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah terhadap motivasi mengajar guru di Kabupaten Keerom." *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 4.2 (2019): 38-57.
- Viktoria, T. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan." *Jurnal Pendidikan Teknik Mekatronika* 5.4 (2015).
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2019, 106.

L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kepala Sekolah:

- i. Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur?
- ii. Apa saja kendala sekolah yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah?
- iii. Bagaimana dampak penggunaan dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah?
- iv. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya?

Untuk Bendahara Sekolah:

1. Bagaimana prosedur pencarian dan penggunaan dana BOS di sekolah?
2. Apakah ada kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dana BOS? Jika ada, apa saja kendalanya?
3. Apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS dari tahun ke tahun?
4. Apakah ada saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah ini?

Untuk Guru dan Staf Sekolah:

1. Apakah ada rapat evaluasi yang melibatkan guru dan staf untuk membahas penggunaan dana BOS?
2. Menurut bapak/ibu, apakah kepala sekolah dan bendahara sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi terkait dana BOS kepada guru dan staf?
3. Apakah ada aspek dalam pengelolaan dana BOS yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan?
4. Apa harapan bapak/ibu terhadap pengelolaan dana BOS agar lebih efektif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini?

LAMPIRAN 2

URAIAN HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : **Zulmin, S.Pd. SD., M.Pd.**
Jabatan : **Kepala Sekolah**
Waktu Pelaksana Penelitian : **21 Mei – 21 Juni 2025**

- Peneliti : Bagaimana proses perencanaan penggunaan dana BOS di SDN 25 Palu Timur?
- Narasumber : Pertama, kami melakukan analisis terhadap *Rapor Pendidikan*. Dari Rapor Pendidikan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki, sehingga berdasarkan hasil analisis itu, kami menentukan langkah-langkah perencanaan. Setelah itu, kami menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), yang memuat seluruh rencana kegiatan dalam satu tahun. Dari berbagai kegiatan tersebut, kemudian dipilah mana yang dapat dianggarkan dan mana yang tidak. Sebelum menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), saya terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan para guru. Namun, tidak semua kebutuhan guru dapat langsung dipenuhi, melainkan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. Perlu dicatat bahwa tidak semua kebutuhan guru dapat diakomodasi karena ada pembiayaan lain yang juga penting, seperti untuk kegiatan pembinaan siswa. Misalnya, saya rutin mengadakan perlombaan antarkelas setiap hari Jumat sebagai bagian dari program pembinaan.
- Peneliti : Apa saja kendala sekolah yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS di sekolah?
- Narasumber : Kendalanya itu adalah kegiatan sudah berjalan tetapi dana BOS belum ada. Kadang-kadang untuk pengembangan siswa, itu saja kendalanya
- Peneliti : Bagaimana dampak penggunaan dana BOS terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah?
- Narasumber : Hasil ini dikasih cepat untuk membuat laporan, dampaknya untuk dana BOS terencana bagus untuk sekolah karena terlaksananya program
- Peneliti : Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya?
- Narasumber : Artinya, pelaporan penggunaan dana BOS di sekolah ini telah dilaksanakan sesuai dengan sistematika dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Bendahara sekolah juga sangat tertib dalam menyusun laporan; semua dokumen disusun secara rapi dan terjadwal dengan baik. Selain itu, pelaporan selalu mengikuti proses asistensi dari pihak dinas. Jika hasil asistensi dinilai sudah sesuai dan lengkap, maka laporan tersebut langsung ditandatangani tanpa perlu dikembalikan atau direvisi. Selama ini, laporan dana BOS dari sekolah kami tidak pernah mengalami pengembalian karena kekeliruan, selalu langsung diterima dan disahkan.

Nama Narasumber : **Rommy, S.Pd. Gr.**
Jabatan : **Bendahara Sekolah**
Waktu Pelaksana Penelitian : **21 Mei – 21 Juni 2025**

Peneliti : Bagaimana prosedur pencairan dan penggunaan dana BOS di sekolah?

Narasumber : Awalnya, proses penggunaan dana BOS dimulai dengan mengidentifikasi masukan dari guru-guru terkait kebutuhan sekolah. Masukan tersebut kemudian dianalisis untuk menentukan mana yang menjadi kebutuhan mendesak dan mana yang dapat ditunda. Setelah itu, hasil analisis tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan awal, dan kami mulai menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan yang telah diprioritaskan. Dalam penyusunannya, kami berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) yang berlaku agar seluruh rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah anggaran disusun, kami melakukan verifikasi dan konsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Kami juga mendiskusikan rencana tersebut secara terbuka dengan melibatkan orang tua siswa, komite sekolah, serta dewan guru, agar ada partisipasi dari berbagai unsur yang ada di lingkungan sekolah. Untuk proses pencairan dana, kami menunggu evaluasi dan pembinaan dari pihak Dinas Pendidikan terlebih dahulu. Dinas akan menilai apakah perencanaan yang kami ajukan sudah sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Jika telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas, maka kami akan menerima surat rekomendasi sebagai dasar untuk melakukan pencairan dana BOS. Proses pencairan ini dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan oleh dinas, dan seluruh langkahnya harus dijalankan secara tertib dan transparan

Peneliti : Apakah adan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan dana BOS? Jika ada, apa saja kendalanya?

Narasumber : Kalau kesulitan, tentu ada, terutama terkait dengan dokumentasi. Karena saya juga seorang guru, dan tugas utama saya bukan sebagai bendahara, kadang ada dokumen yang terlewat atau kurang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, saya harus mereview kembali setiap berkas, mulai dari tanggal, jenis pengeluaran, hingga bukti pendukungnya. Hal-hal kecil seperti ini sangat penting karena akan menjadi fokus dalam pemeriksaan, dan biasanya justru yang tampak sepele itu yang diperiksa secara detail

Peneliti : Apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS dari tahun ke tahun?

Narasumber : Ya, kalau evaluasi pasti dilakukan di akhir. Biasanya setelah pembukuan di akhir Desember, sebelum kita menyusun penganggaran untuk tahun berikutnya. Tentunya, kita mengevaluasi kegiatan mana yang sudah terlaksana dengan baik dan mana yang masih perlu ditambah, terutama terkait sarana dan prasarana yang sudah dianggarkan. Kita juga menilai kegiatan

mana yang tidak perlu dilanjutkan serta mana yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya.

Peneliti : Apakah ada saran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah ini?

Narasumber : Saran saya adalah pentingnya membangun sinergi antara bendahara dan kepala sekolah dalam hal pembelanjaan dana BOS. Meskipun secara teknis dana tersebut dikelola oleh bendahara, namun proses penggunaannya tetap harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah, terutama agar selaras dengan perencanaan dalam RKAS. Jika tidak ada sinergi atau koordinasi yang baik, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan kecurigaan antar pihak. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan sangat diperlukan agar pengelolaan dana BOS berjalan dengan efektif, efisien, dan tetap dalam koridor akuntabilitas

Nama Narasumber : **Safrudin R. Lamadang**
Jabatan : **Guru**
Waktu Pelaksana Penelitian : **21 Mei – 21 Juni 2025**

Peneliti : Apakah ada rapat evaluasi yang melibatkan guru dan staf untuk membahas penggunaan dana BOS?

Narasumber : Ada, karena membahas tentang RKAS. Biasanya sebelum penyusunan RKAS, kami para guru dilibatkan dalam rapat yang diadakan oleh pihak sekolah. Dalam rapat tersebut, kepala sekolah dan bendahara menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun, termasuk bagaimana anggaran akan dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan, terutama terkait kebutuhan pembelajaran di kelas. Jadi, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan kepala sekolah, kami merasa bahwa pendapat dan kebutuhan kami tetap dipertimbangkan dalam penyusunan RKAS

Peneliti : Menurut Bapak, apakah kepala sekolah dan bendahara sudah cukup transparan dalam menyampaikan informasi terkait dana BOS kepada guru dan staf?

Narasumber : Ya, kepala sekolah sangat transparan dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana BOS. Setiap ada perencanaan atau realisasi anggaran, kami para guru selalu dilibatkan dalam rapat. Kepala sekolah biasanya menjelaskan alokasi dana, kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, serta alasan mengapa kegiatan tersebut dipilih. Kami juga diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Jadi, bukan hanya menerima informasi sepihak, tetapi kami benar-benar diajak berdiskusi. Menurut saya, ini sangat baik karena kami merasa dihargai dan ikut memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program-program sekolah

Peneliti : Apakah ada aspek dalam pengelolaan dana BOS yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan?

Narasumber : Kendala biasanya muncul karena bendahara juga merupakan guru kelas, sehingga harus menyelesaikan tugas mengajar terlebih dahulu sebelum melayani kebutuhan lainnya. Hal ini membuat proses kadang sedikit lambat, tetapi tidak menjadi masalah besar.

Peneliti : Apa harapan bapak, terhadap pengelolaan dana BOS agar lebih efektif dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan sekolah ini!

Narasumber : Bendahara BOS dipegang oleh guru, jadi guru-guru lainnya tidak dibebani tanggung jawab sebagai bendahara. Semua urusan administrasi sepenuhnya ditangani oleh bendahara yang sudah ditunjuk

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Keadaan SDN 25 Palu



Wawancara Kepala Sekolah



Wawancara Bendahara Sekolah



Wawancara Guru SDN 25 Palu

LAMPIRAN 4

Rencana Anggaran Sekolah (RKAS)

 RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) SD NEGERI 25 PALU				
NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	KOMPETENSI LULUSAN	Rp.	Rp.	Rp.
2	ISI PENDIDIKAN	Rp.	Rp.	Rp.
3	PROSES PEMBELAJARAN	Rp.	Rp.	Rp.
4	PENILAIAN PENDIDIKAN	Rp.	Rp.	Rp.
5	PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp.	Rp.	Rp.
6	SARANA DAN PRASARANA	Rp.	Rp.	Rp.
7	PENGELOLAAN	Rp.	Rp.	Rp.
8	PEMBIAYAAN	Rp.	Rp.	Rp.
JUMLAH		Rp.	Rp.	Rp.

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	KOMPETENSI LULUSAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2	ISI PENDIDIKAN	Rp. 430.000	Rp. 3.590.000	Rp. 4.043.000
3	PROSES PEMBELAJARAN	Rp. 16.769.075	Rp. 18.184.350	Rp. 35.953.425
4	PENILAIAN PENDIDIKAN	Rp. 26.814.150	Rp. 32.991.100	Rp. 59.805.250
5	PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 6.435.000	Rp. 10.392.500	Rp. 16.827.500
6	SARANA DAN PRASARANA	Rp. 33.907.500	Rp. 55.664.500	Rp. 89.567.000
7	PENGELOLAAN	Rp. 49.633.416	Rp. 40.789.109	Rp. 89.922.525
8	PEMBIAYAAN	Rp. 31.073.725	Rp. 24.710.575	Rp. 55.784.300
JUMLAH		Rp. 185.077.866	Rp. 186.822.134	Rp. 351.900.000

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAP I	TAHAP II	JUMLAH
1	KOMPETENSI LULUSAN	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2	ISI PENDIDIKAN	Rp. 34.375	Rp. 2.514.375	Rp. 2.548.750
3	PROSES PEMBELAJARAN	Rp. 8.260.000	Rp. 19.406.473	Rp. 27.666.473
4	PENILAIAN PENDIDIKAN	Rp. 22.257.200	Rp. 24.500.200	Rp. 46.857.400
5	PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 4.345.000	Rp. 6.185.000	Rp. 10.530.000
6	SARANA DAN PRASARANA	Rp. 54.690.950	Rp. 53.605.050	Rp. 105.296.000
7	PENGELOLAAN	Rp. 51.260.416	Rp. 53.616.961	Rp. 104.877.377
8	PEMBIAYAAN	Rp. 37.112.000	Rp. 32.312.000	Rp. 69.424.000
JUMLAH		Rp. 177.950.941	Rp. 189.740.059	Rp. 367.200.000

BENEKARA _____ NIP. _____
 KEPALA SEKOLAH _____ NIP. _____

LAMPIRAN 5

Daftar Hadir Guru dan Tenaga Kependidikan di SDN 25 Palu



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KELOMPOK KERJA KEPALA SEKOLAH (K3S)
SDN 25 PALU



Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Lrg. Lestari No 7 Palu
Email : sdn25palu2020@gmail.com atau sdn25_palu@yahoo.com

Hari/Tanggal
Waktu
Agenda Pertemuan

: Jumat, 22 Desember 2023
: 14.00-16.00 Wita
: Pembentukan Tim BOSP dan Desiminasi RKAS Tahun Anggaran 2024

No	Nama/NIP	Asal Sekolah	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zulmin, S.Pd.SD., M.Pd NIP 19700705 199606 2 001	Penata Tkt I,III/d	Kepala Sekolah	1
2	Muhlis, S.Pd NIP 19720329 199310 1 001	Pembina Tkt I,IV/b	Guru Kelas 3B	2
3	Asma, S.Pd NIP 19710608 200502 2 002	Penata Tkt I,III/d	Guru Kelas 1A	3
4	Hamka, S.Pd NIP 19750325 200801 1 017	Penata Tkt I,III/d	Guru Kelas 6B	4
5	Umira H. Rusagau, S.Pd NIP 19701018 200501 2 011	Penata Muda Tkt I,III/b	Guru Kelas 6A	5
6	Rommy AR, S.Pd. Gr NIP 19810609 200701 1 005	Penata Muda Tkt I,III/b	Guru Kelas 5A	6
7	Megawati, S.Pd NIP 19751031 201001 2 009	Penata Muda Tkt I,III/b	Guru Kelas 6C	7
8	Yulita Toding Allo, S.Pd NIP 19930720 201908 2 001	Penata Muda, III/a	Guru Kelas 4A	8
9	Datrin Risnawaty Lidjo, S.Pd.K NIP 19700904 201411 2 002	Penata Muda, III/a	Guru PAK	9
10	Herrmina, S.Pd NIP 19820725 202221 2 016	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 5B	10
11	Afnigusrianty, S.Pd NIP 19851013 202221 2 016	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 2B	11
12	Okta Hendra Kaliilo, S.Pd NIP 19801014 202022 1 004	Guru PPPK/IX	Guru PJOK	12
13	Wahyuni, S.Pd.I NIP 19811015 202221 2 010	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 2A	13
14	Supono, S.Pd NIP 19750912 202221 1 005	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 3A	14
15	Listiawati, S.Pd NIP 19840328 202221 2 022	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 1B	15
16	Nurhayati, S.Pd NIP 19810128 202221 2 012	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 4B	16
17	Sri Mulianti, S.Pd NIP 198230203 202221 2 018	Guru PPPK/IX	Guru PJOK	17
18	Mufidah, S.Pd.I NIP 19830521 202221 2 015	Guru PPPK/IX	Guru PAI	18
19	Ni Ketut Srinita Purwanti, S.Pd NIP 19871024 202221 2 009	Guru PPPK/IX	Guru Kelas 4C	19
20	Siti Zamrah, S.Pd.I	Honorer	Guru PAI	20
21	Indarti, S.Pd.I	Honorer	Guru PAI	21
22	Kasmiati, S.Pd.I	Honorer	Guru Kelas 1C	22
24	Febyanti Christina, S.Pd	Honorer	Guru Kelas 2B	24
25	Elisa Dwi Artanti, S.Pd.	Honorer	Guru Bahasa Inggris	25
26	Safrudin R.Lamadang	Honorer	OPS/Adm	26
27	Muh Yusril	Honorer	OPS/Adm	27



LAMPIRAN 6

Notulen Rapat SDN 25 Palu

NOTULEN RAPAT

RAPAT DALAM RANGKA “DESIMINASI RKAS TAHUN ANGGARAN 2023”
SD NEGERI 25 PALU

Agenda Desiminasi :

1. Pembukaan
2. Arahan dari Kepala Sekolah
3. Pemaparan Anggaran dari Bendahara
4. Tanya Jawab

Pembahasan

Kegiatan dimulai tepat pukul 14.30 Wita yang dipandu oleh notulen rapat Sri Mulianti, S.Pd. yang selanjutnya Kepala Sekolah menyampaikan beberapa arahan terkait mekanisme pencairan dana BOSP tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun isi dari kegiatan ini adalah :

- Berdasarkan hasil kesepakatan, Bendahara BOSP tahun anggaran 2024, masih di tugaskan kepada Rommy AR, S.Pd. Gr, dengan pertimbangan, karena memahami alur perancangan, pelaksanaan dan pelaporan dana BOSP.
- Untuk tahun 2024 pencairan dana BOSP sebanyak 2 kali yaitu tahap 1 sekitar bulan Maret 2023 dan Tahap 2 sekitar bulan Agustus 2023
- Adapun dana BOSP yang akan diterima tahun ini adalah 391 siswa x Rp900.000 = Rp351.900.000.
- Dengan rincian :
 - Belanja Pegawai Rp57.000.000
 - Belanja Bahan Habis Pakai Rp67.945.892
 - Belanja Bahan Material Rp6.205.000
 - Belanja Jasa Kantor Rp53.621.087
 - Belanja Cetak dan Penggandaan Rp82.859.725
 - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp3.640.000
 - Belanja Makan Minum Rp43.500.000
 - Belanja Pemeliharaan Rp4.120.000
 - Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp9.360.000
 - Belanja Barang Perlengkapan/Peralatan Kantor Rp9.063.750
 - Belanja Modal Rp12.554.546
- Kegiatan pengembangan mutu guru terutama KKG internal lebih diutamakan..
- Untuk tahun 2024 gaji bagi pendidik honorer sebesar Rp1.000.000, sedangkan untuk tenaga kependidikan masih tetap sesuai dengan aturan anggaran yang berlaku
- Untuk masukan –masukan dari guru lainnya yang meliputi alat peraga di kelas berupa Globe dan Planetarium akan di realisasikan di tahap 1 dan olahraga akan disesuaikan dengan anggaran dengan melakukan penyesuaian anggaran perubahan di tahap 2
- Pembelian alat-alat rumah tangga sekolah, baiknya mempertimbangkan keamanan tempat barang tersebut
- Di tahun 2024 ini, sekolah masih menganggarkan barang-barang peralatan kantor seperti kursi plastic 30 buah, lemari kepala sekolah
- Tidak semua kebutuhan guru untuk penunjang pembelajaran terpenuhi,nantinya akan direalisasikan secara bertahap

- Untuk Pembina ekstrakurikuler pramuka, dan pembimbing olimpiade IPA sekolah mendatangkan pelatih dari luar
- Saat ini sekolah masih membutuhkan pelatih untuk kegiatan FLS2N

Kegiatan desimiasi ini berlangsung selama kurang lebih 90 menit dan berakhir pada pukul 16.00 wita.

Palu, 22 Desember 2023

Kepala Sekolah,



Zulmin, S.Pd. M.Pd

NIP 19700705 199606 2 001

LAMPIRAN 7

Undangan Pembentukan Tim BOSP dan Destimasi RKAS tahun 2024



NPSN 40203557

PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR WILAYAH 2 KECAMATAN PALU TIMUR/MANTIKULORE
SDN 25 PALU



NSS 101186013025

TERAKREDITASI A (UNGGUL)

Alamat : Jl. Otto Iskandardinata Lrg Lestari No 7 Palu

Facebook: Beranda dualima palu Instagram: berandasdn25palu Email: sdn25palu2020@gmail.com

Nomor : TU.5 / 425 / 421.2/Pend Palu, 20 Desember 2023
Lampiran : - Kepada
Perihal : Undangan Pembentukan Tim BOSP dan Desiminasi RKAS Tahun Anggaran 2024 Yth Bapak/Ibu Pengurus Komite Sekolah
Di
Palu

Dengan hormat,

Mengundang Bapak/Ibu pengurus Komite SDN 25 PALU untuk mengikuti pertemuan di sekolah yang Insha Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 22 Desember 2023
Waktu : 14.00 Wita
Tempat : Ruang Kantor SDN 25 PALU
Agenda : 1. Pembentukan Tim BOSP Tahun Anggaran 2024
2. Desiminasi RKAS Tahun Anggaran 2024

Demikian Undangan ini disampaikan,atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah,



Zulmin, S.Pd. SD. M.Pd.
NIP 19700705 199606 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi :

Nama : Ainin Mawaddah
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 24 Maret 2002
NIM : 20.5.12.0211
Agama : Islam
Status : Belum menikah
Alamat : Jl. Bantilan No.27 Palu Barat
No. Hp : 081356222594
Nama Ayah : Hi. Sadri B. Syuaib
Nama Ibu : Hj. Dahnia



B. Riwayat Pendidikan

- a. Play Grup (PAUD) tahun lulus : Sitti Masyitah, 27 Juni 2006
- b. TK, tahun lulus : Taman Awaliyah Sitti Masyitah, 27 Juni 2008
- c. SD, tahun lulus : SD Inpres Bumi Bahari, 27 Juni 2014
- d. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 3 Palu , 05 Juni 2017
- e. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 4 Palu, 08 Juli 2020

Palu, 18 Agustus 2025 M

24 Safar 1447 H

Penulis

Ainin Mawaddah

NIM. 20.5.12.0211